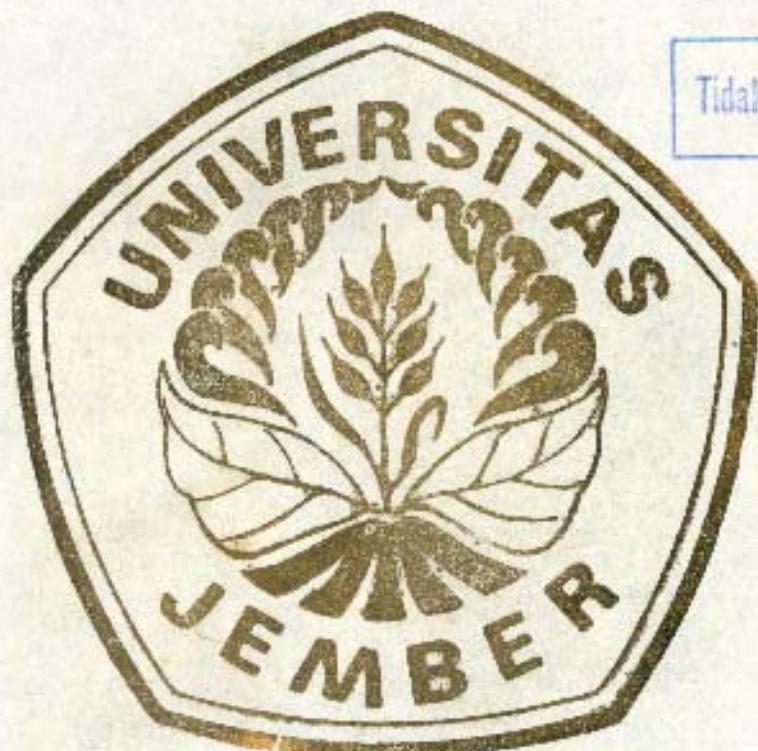




FAKULTAS PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER

HUBUNGAN ANTARA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH
DENGAN KEGIATAN AKSEPTOR KB MANDIRI
DI KECAMATAN TAPEN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO
TAHUN 1995

SKRIPSI



Tidak Dijinjamkan Keluar

Oleh :

Jeti Sumiyatiningsih

NIM. 9102104325

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER

1996

M O T T O

اَنْتَيْمُ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ ، حَيَاكَ قَبْلَ مَوْتِكَ
وَسَعَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ ، وَرَاغَكَ قَبْلَ سُلْكِكَ
وَسَبَا بَكَ قَبْلَ حَرَمَكَ ، وَعَنَاكَ قَبْلَ فَقْرَكَ
(رواه ببيهقي عن ابن عباس)

Artinya :

"Kerjakanlah selagi ada lima kesempatan sebelum datangnya lima penghambat, yaitu : selagi masih hidup sebelum matimu, selagi engkau sehat sebelum sakitmu, selagi engkau mempunyai waktu terluang sebelum sibukmu, selagi engkau muda sebelum datang masa tuamu, dan selagi engkau masih kaya sebelum datang kefakiranmu".

(HR. Baihaqi dari Ibnu Abbas)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. ayah (saim) dan mamaku tersayang
2. saudara-saudaraku tercinta teteh Titin, Kak Pandam dan Adikku Neneng
3. kekasihku tersayang Chsirui Anan
4. guru-guruku yang mulia
5. sahabat-sahabatku Wulan, Ririn, Roeadah, Umi, List dan Ima.
6. alim-alim tercinta.

HUBUNGAN ANTARA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH
DENGAN KEGIATAN AKSEPTOR KB MANDIRI
DI KECAMATAN TAPEN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO
TAHUN 1995

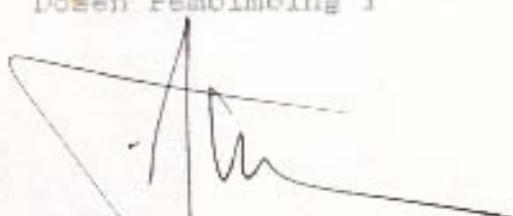
SKRIPSI

Diajukan guns memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan
program pendidikan Sarjana Jurusan Ilmu Pendidikan
Program Pendidikan Luar Sekolah pada Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember

Nama : Teti Sumiyatiningsih
Nim : 9102104325
Jurusan : Ilmu Pendidikan
Program : Pendidikan Luar Sekolah
Angkatan : 1991
Tempat/Tanggal lahir : Bekasi, 1 Agustus 1972

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I



Drs. H. Sukamto Irch
Nip. 130 325 913

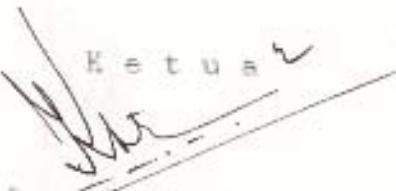
Dosen Pembimbing II



Dra. Khutobah
Nip. 131 131 017

Diterima dan dipertahankan di depan Sidang Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember sebagai Skripsi.

Pada hari : Senin
Tanggal : 11
Bulan : Maret
Tahun : 1998
Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Jember

Ketua

Dra. Tustontonijah
NIP. 130 325 919

Tim Pengaji,

Sekretaris

Dra. Khutobah
NIP. 130 131 017

Anggota :

1. Drs. Kusnan Riyadi
NIP. 130 355 406
2. Drs. H. Soekamto Irch.
NIP. 130 325 913
3. Drs. E a m d i
NIP. 130 359 901

Mengesahkan,

Dekan



KATA PENGANTAR

Atas Berkat Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala penulis puji dan puji syukur kehadirat-Nya, karena hanya dengan kebesarannya semata penulis mampu menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana.

Karya tulis ini dibuat dan diupayakan semakinal mungkin sebatas kemampuan penulis berdasarkan sumber daya yang ada, dengan harapan dapat memenuhi target sebagaimana yang diinginkan.

Berikut atas terselesaiannya karya tulis ini, penulis sempaikan penghargaan yang sebesar-besarnya serta ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
2. Ketua program Pendidikan Luar Sekolah jurusan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dosen Pembimbing I yang telah ikhlas dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan;
4. Dosen Pembimbing II yang telah ikhlas dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan;
5. Camat Wilayah Kecamatan Tapen Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso yang telah memberikan kesempatan pelajaran dalam memperoleh data;
6. Pengawas PLKB Kecamatan Tapen yang telah memberikan fasilitas dan informasi dalam menyusun skripsi ini;
7. Para bapak dan Ibu yang telah banyak mendidik penulis sejama study;

8. Seluruh pihak yang telah membantu sehingga terselesaikannya penyusunan karya tulis ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Semoga atas semua petunjuk, bimbingan serta berbagai bantuanmu, menjadi amal yang baik dan mendapat balasan yang setimpal dari-Nya.

Penulis menyadari, bahwa sesungguhnya apa yang telah disajikan masih jauh dari kesempurnaan. oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif senantiasa penulis harapkan sehingga menjadi kesempurnaan skripsi yang penulis buat.

Akhirnya penulis berdo'a semoga karya tulis ini bisa memberikan manfaat dan kemajuan, serta mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mendapat perlindungan dari-Nya. Amiin.

Jember,

Penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
MOTTO	ii
PERSEMPAHAN	iii
PENGAJUAN	iv
PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
PETA	xiii
ABSTRAK	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul	1
1.2 Batasan Batasan	2
1.2.1 Batasan Pengertian Judul	2
1.2.1.1 Hubungan	2
1.2.1.2 Jenjang Pendidikan Sekolah Akseptor KB Mandiri	3
1.2.1.3 Kegiatan Akseptor KB Mandiri	5
1.2.2 Batasan Masalah Penelitian	5
1.2.2.1 Latar Belakang Masalah Penelitian	6
1.2.2.2 Rumusan Masalah Penelitian	8
1.2.3 Batasan Daerah Penelitian	9
1.2.4 Batasan Responden dan Informan Penelitian	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10

BAB II DASAR PANDANGAN TEORI DAN HIPOTESIS	12
2.1 Pengertian, Fungsi Teori dan Hipotesis	
Penelitian	12
2.1.1 Pengertian Teori	12
2.1.2 Pengertian Hipotesis	12
2.1.3 Fungsi Teori dalam Penelitian	13
2.1.4 Fungsi Hipotesis Dalam Penelitian	13
2.2 Dasar Pandangan Teori tentang Jenjang Pendidikan	
Akteptor KB Mandiri	14
2.2.1 Pengertian Pendidikan	14
2.2.2 Jalur Pendidikan di Indonesia	15
2.2.2.1 Jalur Pendidikan Luar Sekolah ...	16
2.2.2.2 Jalur Pendidikan Sekolah	17
2.2.3 Jenjang Pendidikan Sekolah	17
2.2.3.1 Jenjang Pendidikan Dasar	18
2.2.3.2 Jenjang Pendidikan Menengah	19
2.2.3.3 Jenjang Pendidikan Tinggi	20
2.2.4 Pengertian Akteptor KB Mandiri	21
2.3 Kegiatan Akteptor KB Mandiri	23
2.3.1 Tempat-tempat Pelayanan Kontrasepsi KB	
Mandiri	24
2.3.2 Menggunakan Kontrasepsi Secara Teratur	
Sesuai Pedoman Pemakaiannya	26
2.3.3 Mengajak Tetangga dan Kenalan Untuk Ikut	
Ber-KB Mandiri	31
2.4 Hubungan Jenjang Pendidikan Sekolah Dengan	
Kegiatan Akteptor KB Mandiri	31
2.5 Hipotesis	33

BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Batasan Pengertian Metode Penelitian	34
3.2 Metode Penentuan Daerah Penelitian	34
3.3 Metode Penentuan Responden Penelitian	34
3.4 Metode Pengumpulan Data	38
3.4.1 Observasi	39
3.4.2 Angket	40
3.4.3 Wawancara	42
3.4.4 Dokumenter	43
3.5 Metode Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian	52
4.1.1 Letak dan Batas Daerah Penelitian	52
4.1.2 Pembagian Wilayah	52
4.1.3 Areal Tanah	53
4.1.4 Pemerintahan	53
4.1.5 Keadaan Penduduk	54
4.1.5.1 Jumlah Penduduk	54
4.1.5.2 Keadaan Pendidikan	55
4.1.6 Mata Pencaharian	56
4.1.7 Keadaan Keagamaan	57
4.1.8 Kesehatan dan Keluarga Berencana	57
4.2 Data Untuk Uji Hipotesis	59
4.2.1 Rekaman Data	64
4.3 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis	72
4.4 Diskusi	73
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	75

LAMPIRAN :

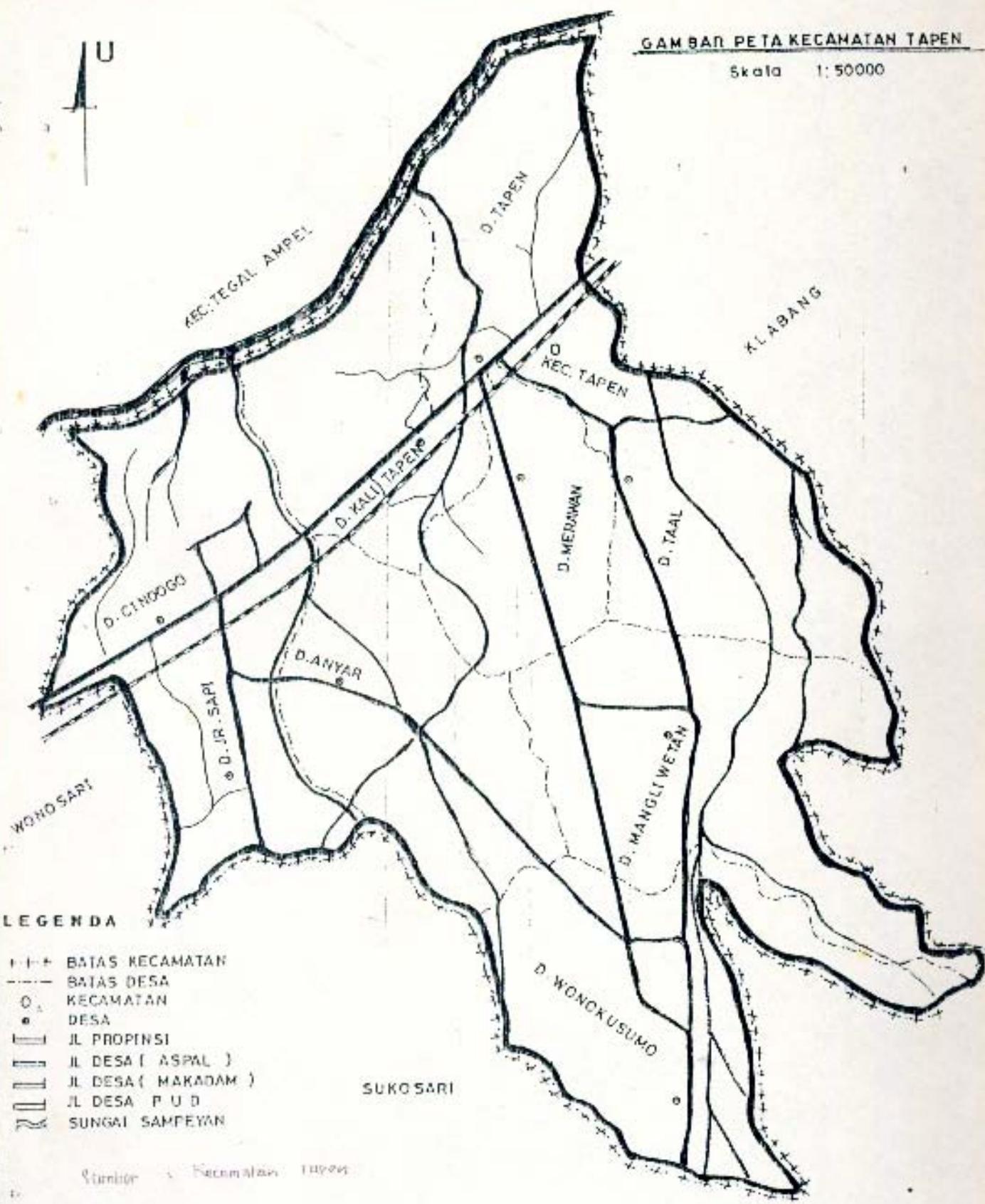
- 1 Matrik Penelitian
- 2 Angket Penelitian
- 3 Hasil Rekaman Data
- 4 Pedoman Dokumenter
- 5 Pedoman Interview
- 6 Pedoman Observasi
- 7 Nama-nama Responden Penelitian
- 8 Surat Ijin Penelitian

DAFTAR TABEL

Ro Daftar	Bent. Tabel	Judul Tabel	Hal
1	2	3	4
1.		Pembagian wilayah kecamatan Tapen	52
2.		Lalu wilayah Kecamatan Tapen Tahun 1995	53
3.		Daftar Nama-nama Kepala Desa Wilayah Kecamatan Tapen	54
4.		Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin diwilayah Kecamatan Tapen	54
5.		Kesdaraan Penduduk Kecamatan Tapen menurut tingkat pendidikan tahun 1995	55
6.		Jumlah sarana pendidikan di wilayah Kecamatan Tapen	55
7.		Jumlah penduduk menurut mata pencaharian	56
8.		Jumlah sarana perekonomian di wilayah kecamatan Tapen	56
9.		Jumlah tempat ibadah di wilayah kecamatan Tapen	57
10.		Jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Tapen	57
11.		Daftar nama-nama petugas PLKB dan PPKBD per desa di wilayah Kecamatan Tapen	58
12.		Jumlah pasangan usia subur (PUS) dan akseptor KB per desa di wilayah Kecamatan Tapen tahun 1995	58
13.		Jumlah alat/cara kontrasepsi yang dipakai oleh akseptor KB per desa di wilayah Kecamatan Tapen tahun 1995	59
14.		Jumlah akseptor KB mandiri menurut ijasah terakhir yang dimiliki ke tiga desa yang menjadi sampel penelitian	61
15.		Jumlah sampel penelitian berdasarkan ijasah terakhir yang dimiliki	61
	1	Kategorisasi responden berdasarkan jenjang pendidikan sekolah	62
	2	Skoring data dan kategorisasi kegiatan akseptor KB mandiri	66
	3	Rekapitulasi data kategori jenjang pendidikan sekolah dan kegiatan akseptor KB mandiri	69
	4	Rekapitulasi jumlah kategorisasi jenjang pendidikan sekolah dan kegiatan akseptor KB mandiri	71
	5	Analisis data tentang hubungan antara jenjang pendidikan sekolah dengan kegiatan akseptor KB mandiri	72
	6	Hasil rekaman data tentang kegiatan akseptor KB mandiri	1-3
	7	Nama-nama responden penelitian	1-7

GAMBAR PETA KECAMATAN TAPEN

Skala 1: 50000



LEGENDA

- - - BATAS KECAMATAN
- - - BATAS DESA
- KECAMATAN
- DESA
- [] JL PROPINSI
- [] JL DESA [ASPAL]
- [] JL DESA [MAKADAM]
- [] JL DESA PUD
- [] SUNGAI SAMPEYAN

Stumbuh Kecamatan Tapen

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Hubungan Antara Jenjang Pendidikan Sekolah Dengan Kegiatan Akseptor KB Mandiri di Kecamatan Tapen Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Tahun 1995". Adapun yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah adanya kenyataan di masyarakat bahwa ada sebagian masyarakat yang menjadi akseptor KB Mandiri yang jenjang pendidikannya rendah tetapi dalam kegiatan akseptor KB mandiri baik, sementara ada juga sebagian masyarakat yang menjadi akseptor KB Mandiri yang jenjang pendidikannya tinggi tetapi dalam kegiatan akseptor KB mandiri kurang. Selanjutnya berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalahnya dapat dirumuskan. "Adakah hubungan antara jenjang pendidikan sekolah dengan kegiatan akseptor KB Mandiri". Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, ingin membuktikan ada tidaknya hubungan antara jenjang pendidikan sekolah dengan kegiatan akseptor KB Mandiri di kecamatan Tapen Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso.

Berdasarkan kajian teoritis di dapati dugaan sementara (hipotesis) "ada hubungan antara jenjang pendidikan sekolah dengan kegiatan akseptor KB Mandiri".

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tapen dengan menetapkan 3 (tiga) desa untuk menjadi sampel penelitian, yaitu desa Wonokusumo, desa Mangliwetan, dan desa Cindogo. Pengambilan responden dilakukan secara proporsional random sampling, dengan cara undian.

Analisis data yang dilakukan dengan teknik statistik Yule's Q tuk variabel dengan rumus sebagai berikut :

$$Q_{XY} = \frac{(B \times C) - (A \times D)}{(B \times C) + (A \times D)}$$

Hasil analisis data menunjukkan bahwa hipotesis nihil yang berbunyi "tidak ada hubungan antara jenjang pendidikan sekolah dengan kegiatan akseptor KB mandiri" ditolak. Adapun hipotesis yang diterima adalah hipotesis kerja yang berbunyi "ada hubungan antara tingkat pendidikan sekolah dengan kegiatan akseptor KB mandiri".

Hasil dari analisis didapatkan suatu kesimpulan bahwa ada hubungan positif yang mantap antara jenjang pendidikan sekolah dengan kegiatan akseptor KB mandiri di Kecamatan Tapen Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso. Artinya semakin rendah jenjang pendidikan sekolah akseptor KB mandiri, maka semakin kurang puas dalam kegiatan akseptor KB mandiri.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, diberikan saran-saran yang intinya berupa himbauan kepada pemerintah agar meningkatkan taraf pendidikan masyarakat yang nantinya dapat membantu mensukseskan program KB, kepada PLKB dan pejabat yang berwenang untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar mereka lebih termotivasi untuk mengikuti program KB, kepada masyarakat desa dan tokoh masyarakat untuk memotivasi dan mendukung masyarakat untuk mau mengikuti program wajib belajar. Kepada akseptor KB mandiri diharapkan sensasi memperluas wawasan guna memperoleh pengetahuan terbaru.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Iatar Belakang Pemilihan Judul

Tujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut di atas, diselenggarakan pembangunan nasional secara bertahap dan berkesinambungan dalam rangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu disegala sektor termasuk usaha-usaha untuk mengendalikan lajunya pertumbuhan penduduk sebagaimana yang dituangkan dalam Garis-Garis Besar haluan Negara program keluarga berencana merupakan salah satu program utama yang harus disukseskan (1993:203).

Program tersebut juga merupakan bagian penting dari kebijaksanaan kependudukan yang menyeluruh, dimana dalam pelaksanaannya meliputi program pembangunan disegala bidang baik bersifat fisik maupun non fisik, yang diusahakan pemerintah atau lembaga-lembaga masyarakat dalam rangka menyelenggarakan suatu gerakan masyarakat yang dikenal sebagai program KB mandiri.

Bintoro Tjokroasmidjojo mengemukakan, bahwa sekarsang ini disadari adanya suatu kenyataan :

- a. sebagian masyarakat yang menjadi akseptor KB mandiri yang jenjang pendidikannya rendah tetapi dalam kegiatan akseptor KB mandiri baik,
- b. sebagian masyarakat yang menjadi akseptor KB mandiri yang jenjang pendidikannya tinggi tetapi kegiatan akseptor KB mandiri kurang (1987:228).

Karena itulah pelaksanaan pelayanan KB mandiri sebagai bentuk lain mengerahkan bantuan masyarakat sedemikian rupa, sehingga masyarakat dapat merasakan kesempatan meng-KB-kan dirinya sendiri. Pelaksanaan pelayanan KB mandiri bukan saja sekedar memenuhi kebutuhan sendiri maupun membantu orang lain. Tetapi lebih luas hasil kesadaran dan tanggung jawab diharapkan adanya sikap mental dari seorang peserta KB yang dalam melaksanakan KB sudah tidak tergantung pada orang lain. Karena itulah pelaksanaan program KB memacu kesejahteraan keluarga, agar hasilnya tercapai secara maksimal.

Berkat dari pikiran inilah, peneliti mengangkat judul tentang "Hubungan Antara Jenjang Pendidikan Sekolah Dengan Kegiatan Akseptor KB Mandiri di Kecamatan Tapen Kabupaten Tingkat II Bondowoso".

1.2 Batasan-Batasan

1.2.1 Batasan Pengertian Judul

Batasan pengertian judul diberikan agar membantu pemahaman yang jelas tentang maksud dan ruang lingkup pembahasan. Ada beberapa istilah yang perlu diberikan batasan yaitu :

- a. Hubungan
- b. Jenjang Pendidikan Sekolah Akseptor KB Mandiri
- c. Kegiatan Akseptor KB Mandiri

1.2.1.1 Hubungan

Menurut W.J.S Poerwadarminto menyatakan bahwa hubungan adalah keadaan berhubungan, kontak, sangkut paut, ikatan (1984:362). Kemudian Yulius dan kawan-kawan hubungan adalah pertalian, berkaitan (1984:14).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan adalah pertalian atau sangkut paut antara satu dengan yang lain.

1.2.1.2 Jenjang Pendidikan Sekolah Akseptor KB Mandiri

Jenjang pendidikan, jelas yang dimaksud adalah sekolah, sebab salah satu ciri pendidikan sekolah adalah berjenjang dan berkesinambungan. Seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 bahwa "jenjang pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan" (1992:8). Kemudian menurut kumpulan Istilah Bidang Kependudukan Keluarga Berencana dijelaskan bahwa pendidikan sekolah adalah "suatu proses pendidikan yang sistematis dan terorganisir serta berjenjang yang dilaksanakan di jalur pendidikan formal dimana peserta didik diterima berdasarkan credential tertentu dan terbatas pada usia sekolah, dengan tujuan memberikan ilmu pengetahuan untuk memasuki jenjang yang lebih tinggi" (1985:30). Selanjutnya menurut Undang-undang no. 2 tahun 1989 bahwa jenjang pendidikan adalah "satu tahap pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan dan kedalam bahan pengajaran" (1992:6). Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (1992:10).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa jenjang pendidikan sekolah adalah tahap pendidikan berkelanjutan mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara teratur, berencana dan sistematis, dengan tujuan memberikan ilmu pengetahuan untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Adapun pengertian akseptor KB, dalam buku Kumpulan Istilah Bidang Kependudukan Keluarga Berencana dijelaskan bahwa akseptor KB adalah "pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan" (1985:2).

Pengertian KB sendiri menurut buku Kumpulan Istilah Bidang Kependudukan Keluarga Berencana adalah kegiatan untuk melakukan pembatasan kelahiran baik untuk sementara agar dapat dicapai jarak yang diharapkan antara kelahiran, maupun untuk selamanya agar dapat mencegah bertambahnya anak (1985:15). Kemudian dalam buku Program KB mandiri menyatakan bahwa KB Mandiri adalah suatu keadaan atau sikap mental dimana dalam melaksanakan program KB seseorang tidak lagi tergantung pada orang lain atau pihak lain (1988:3). Selanjutnya pengertian KB Mandiri di atas, dipertegas dalam buku Informasi Dasar Lingkaran Biru KB yang menyatakan bahwa KB Mandiri berarti pelaksanaan KB dari seseorang atau kelompok yang tidak tergantung dari orang atau pihak lain (tth:6).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akseptor KB Mandiri adalah pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu kontrasepsi dengan inisiatif dari prakarsa sendiri bahkan dengan biaya sendiri tanpa tergantung dari pihak lain untuk mengatur jarak kelahiran ataupun untuk mengakhiri kehamilan demi terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Berdasarkan dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jenjang pendidikan sekolah akseptor KB Mandiri adalah tahap pendidikan, baik pendidikan dasar, pendidikan menengah atau pendidikan tinggi yang pernah ditempuh oleh para pasangan usia subur yang memakai salah satu kontrasepsi dengan inisiatif dan prakarsa sendiri bahkan dengan biaya sendiri tanpa tergantung dari pihak lain.

1.2.1.3 Kegiatan Akseptor KB Mandiri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kegiatan adalah "aktivitas, kegairahan, usaha, pekerjaan, kekuatan dan ketangguhan" (1980:276).

HinggaKB Mandiri merupakan pelaksanaan KB dimana peserta KB tanpa harus tergantung pada pihak lain, maka peserta KB atau akseptor KB harus berusaha sendiri dalam rangka mendapatkan kontrasepsi. Dalam berusaha disini berarti akseptor KB tersebut dapat mendapatkan kontrasepsi yang diinginkan.

Mengenai kegiatan atau aktivitas akseptor KB mandiri dalam buku Program KB Mandiri ada 3 (tiga), yaitu :

1. mendatangi tempat-tempat pelayanan untuk memperoleh kontrasepsi;
2. menggunakan kontrasepsi secara teratur sesuai dengan pedoman pemakaian alat kontrasepsinya;
3. mengajak tetangga dan kenalan untuk ikut ber KB mandiri" (1988:24).

1.2.2 Batasan Masalah Penelitian

Winarno Surachmad menjelaskan batasan masalah sebagai berikut :

"masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui (dengan jalan mengatasinya) apabila akan berjalan terus maka akan menggerakkan kita untuk membahasnya" (1990:79).

Sedangkan Joko Subagyo mendefinisikan "permasalahan adalah rintangan yang dihadapi dan memerlukan penyelesaian" (1991:79).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa masalah penelitian adalah persoalan-persoalan dan rintangan yang dihadapi yang akan dipecahkan melalui penelitian.

1.2.2.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, cita-cita bangsa Indonesia diamanatkan, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial (1993:1). Demikian sebaliknya, cita-cita luhur bangsa Indonesia dapat tercapai melalui pembangunan di segala bidang, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Untuk merealisasikan kesejahteraan umum atau kesejahteraan bangsa terlebih dahulu harus meningkatkan kesejahteraan keluarga, mengingat keberadaan suatu bangsa terbentuk dari berbagai keluarga sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat. Tercapainya keluarga sejahtera perlu adanya akan pengaturan jumlah kelahiran melalui program KB. Seperti apa yang dikatakan dalam buku Kamus Istilah Keluarga Berencana bahwa keluarga berencana merupakan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pemberian ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera (1992:49-50).

Dari penjelasan di atas, bahwa setiap keluarga mempunyai tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam mensukseskan program KB dalam rangka mengatur jumlah dan jarak kelahiran demi tercapainya kesejahteraan keluarga yang akhirnya tercapai pula kesejahteraan umum.

Dewasa ini masyarakat semakin menyadari akan pentingnya KB dalam kehidupan keluarga, sebagaimana keluarga berencana merupakan kebutuhan bagi masyarakat yang benar-benar menyadari dan mendambakan arti pentingnya keluarga sejahtera. Mengingat kondisi masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya keluarga berencana, maka perkembangan lebih lanjut dari program KB dijelaskan dalam buku Bunga

Rampai dinyatakan dalam pidato Kepala BKKBN bahwa pada 1987 oleh pemerintah dicanangkan menjadi KB Mandiri (1988:22).

Dilihat dari kenyataan sehari-hari, masyarakat dalam menerima dan melaksanakan program KB Mandiri antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain tidak sama. Ketidaksamaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor pendidikan terutama pendidikan formal. Seperti yang dijelaskan oleh Sanapiah Faisal bahwa pendidikan formal dapat melahirkan pemikiran-pemikiran, praktik-praktek baru yang inovatif, tentu saja untuk diabadikan bagi perbaikan kehidupan di masyarakat (1980:129). Adapun dalam kenyataannya untuk menjadi akseptor KB Mandiri perlu adanya pemikiran-pemikiran, praktik-praktek baru yang inovatif dalam kehidupan masyarakat. Bintoro Tjokroasmidjojo berpendapat bahwa jenjang pendidikan atau tingkat pendidikan yang memadai akan memberikan kesadaran yang lebih tinggi dalam berwarganegara dan memudahkan bagi pengembangan identifikasi dalam tujuan pembangunan (1987:229).

Selanjutnya berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi latar belakang masalah penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) adanya kenyataan di masyarakat bahwa ada sebagian masyarakat yang menjadi akseptor KB mandiri yang jenjang pendidikannya rendah tetapi dalam kegiatan akseptor KB Mandiri baik, 2) sementara ada juga sebagian masyarakat yang menjadi akseptor KB mandiri yang jenjang pendidikannya tinggi tetapi dalam kegiatan akseptor KB Mandiri kurang.

Dari sinilah penulis memandang perlu memilih judul skripsi tentang "HUBUNGAN ANTARA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DENGAN KEGIATAN AKSEPTOR KB MANDIRI DI KECAMATAN TAPEN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO".

Adapun pertimbangan-pertimbangan yang mendorong penulis untuk memilih judul skripsi di atas sebagai berikut :

- a. topik permasalahan ini merupakan masalah yang cukup penting untuk dibicarakan/dibahas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
- b. topik permasalahan ini menarik perhatian bagi penulis.
- c. cukup tersedianya biaya, waktu dan tenaga yang menunjang dalam terselesainya penelitian.
- d. topik permasalahan masih dalam atau dapat dijangkau penulis.
- e. tersedianya literatur-literatur yang mendukung untuk pemecahan masalah.

1.2.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah penelitian merupakan hal yang mutlak harus dibuat oleh peneliti sebelum mengadakan penelitian. Sebab dengan perumusan masalah, akan memberikan arah yang jelas terhadap alur pembahasan. Muhammad Nasir mengatakan bahwa "perumusan masalah adalah hulu dari penelitian dan merupakan langkah penting dalam penelitian" (1988:133). Kemudian Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa "perumusan masalah atau perumusan problematik adalah pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh peneliti yang jawabannya akan diperoleh setelah penelitian selesai dilaksanakan yaitu pada kesimpulan" (1992:48).

Berdasarkan latar belakang yang sudah diungkap di atas, serta mengacu pada variabel penelitian sebagaimana judul penelitian ini, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Adakah hubungan dan jika ada sejauh mana hubungan antara jenjang pendidikan sekolah dengan kegiatan akseptor KB mandiri di Kecamatan Tepen Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso.

1.2.3 Batasan Daerah Penelitian

Daerah penelitian merupakan tempat dimana dilaksanakan suatu penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Joko Subagyo bahwa "daerah penelitian adalah suatu daerah dengan batasan yang jelas agar tidak menimbulkan kekaburuan, dengan kejelasan daerah atau wilayah tertentu" (1991:33). Sedangkan Sri Adji Surjadi memberikan batasan mengenai daerah penelitian yaitu "daerah yang digunakan sebagai tempat dilaksanakan penelitian" (1984:17).

Berdasarkan pengertian di atas, daerah penelitian yang ditetapkan adalah Kecamatan Tapen kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso.

1.2.4 Batasan Responden dan Informan Penelitian

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa "responden adalah orang yang meresponden atau menjawab pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun pertanyaan lisan" (1992:102). Sedangkan menurut Sutrisno Hadi bahwa "responden adalah orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan dalam kuisioner boleh dan dapat memberikan jawaban secara bebas terhadap tiap-tiap item" (1992:149).

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa responden adalah orang yang memberikan jawaban secara bebas terhadap pertanyaan tertulis maupun lisan. Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah ibu-ibu usia subur yang berijasah pendidikan sekolah dan aktif mengikuti kegiatan akseptor KB Mandiri di Kecamatan Tapen Kabupaten Tingkat II Bondowoso, dengan jumlah responden sebanyak 100 orang.

Disamping responden dalam penelitian juga memerlukan informan untuk melengkapi keterangan-keterangan data yang diperlukan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Koentjorongrat bahwa informan adalah "orang-orang yang dapat memberikan keterangan data dari individu tertentu untuk

keperluan informasi" (1988:63). Sedangkan Sri Adji Surjadi mengatakan bahwa "informasi adalah orang yang dapat memberikan informasi terhadap masalah yang diteliti" (1984:3).

Berdasarkan kedua pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa informan adalah orang-orang yang dapat memberikan keterangan data atau informasi tertentu terhadap masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah :

1. Camat
2. Petugas PLKB
3. Tokoh masyarakat
4. Ketua RW dan ketua RT
5. Kepala Desa

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dalam ilmu-ilmu empiris pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan (Sutrisno Hadi, 1992:3). Memperhatikan pendapat diatas maka tujuan penelitian ini yang ingin dicapai adalah :

- Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dan kalau ada sejauh mana hubungan antara jenjang pendidikan sekolah dengan kegiatan akseptor KB mandiri di Kecamatan Tapen Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat penelitian yang diharapkan bisa diperoleh melalui penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1.4.1 Bagi Peneliti

Akan menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan kependidikan luar sekolah sebagai spesialisasi program peneliti.

1.4.2 Bagi Perguruan Tinggi

Akan merupakan balikan langsung yang sekaligus merupakan penerapan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk menentukan kebijaksanaan.

1.4.3 Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan khususnya dalam pelaksanaan kegiatan akseptor KB mandiri.

1.4.4 Bagi Masyarakat

Akan dapat menambah pengetahuan dan dapat mengubah pengembangan dirinya menuju perubahan yang positif dalam ber KB mandiri sesuai dengan kemampuannya.

BAB II

DASAR PANDANGAN TEORI DAN HIPOTESIS

2.1 Pengertian, Fungsi Teori dan Hipotesis Penelitian

2.1.1 Pengertian Teori

Teori dalam suatu penelitian merupakan hal yang mendasar guna memberikan landasan pemikiran dalam memecahkan suatu masalah. Winsarno Sarsachmad memberikan pengertian bahwa "teori adalah perumusan (sementara) tentang suatu kemungkinan dalil (1985:54). Sedangkan Komarudin mendefinisikan,

"teori adalah seperangkat gagasan (konsep), definisi-definisi yang proporsi-proporsi yang berhubungan satu dengan yang lain, yang menunjukkan fenomena-fenomena yang sistematis dengan menetapkan hubungan antara variabel dengan tujuan untuk menjelaskan atau memahami fenomena-fenomena" (1964:280).

Dari pengertian pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa teori adalah suatu rumusan atau konsep yang sistematis yang digunakan sebagai alat untuk menerangkan atau menafsirkan gejala yang diamati dalam rangka memecahkan suatu masalah.

2.1.2 Pengertian Hipotesis

Pengertian hipotesis seperti dikemukakan oleh Muhammad Ali bahwa "hipotesis adalah rumusan jawaban sementara yang harus diuji melalui kegiatan penelitian" (1985:520). Kemudian Suarsimi Arikunto mengatakan "hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalah penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul" (1992:62).

Pendapat-pendapat tersebut memberikan arah bahwa hipotesis dapat disimpulkan sebagai suatu rumusan jawaban sementara yang harus dibuktikan kebenarannya.

2.1.3 Fungsi Teori Dalam Penelitian

Peranan teori dalam suatu penelitian sangat vital, sebab teori memberikan landasan berfikir dalam menecahkan suatu masalah. Fungsi teori dalam suatu penelitian menurut Sri Adji Surjadi adalah :

1. Sebagai sarana untuk mengadakan penggolongan,
2. Sebagai sarana dalam menentukan hipotesis (1984:3).

Koentjorongrat memberikan keterangan secara tegas bahwa hubungan teori hanya akan ada rangkaian fakta, tetapi tidak ada ilmu pengetahuan" (1986:18). Selanjutnya ditambahkan bahwa :

"teori merupakan alat yang penting dari suatu ilmu pengetahuan, dengan teori dapat :

1. menyimpulkan generalisasi-generalisasi dari hasil pengamatan;
2. memberi kerangka orientasi untuk analisa dan klasifikasi dari fakta-fakta yang dikumpulkan dalam penelitian;
3. memberikan ramalan terhadap gejala-gejala baru yang akan terjadi;
4. mengisi lowongan-lowongan dalam pengetahuan tentang gejala yang telah atau sedang terjadi" (1986:22).

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi teori dalam penelitian adalah mengarahkan sasaran pemecahan masalah baik itu berupa eksplanasi (penjelasan) maupun prediksi (meramalkan).

2.1.4 Fungsi Hipotesis Dalam Penelitian

Menurut Winarno Surachmad, hipotesis mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menjelaskan masalah;
- b. petunjuk metodologi atau cara-cara kerja;
- c. sebagai patokan untuk menilai kerja;
- d. menyusun dan membuktikan penyelidikan (1985:39).

Sedangkan Koentjorongrat mengemukakan bahwa fungsi hipotesis adalah :

- "a. memberikan tujuan yang tegas dalam penelitian.
 - b. membantu dalam penentuan arah yang harus ditempuh
 - c. menghindari suatu penelitian yang tak terarah dan tak bertujuan, dan pengumpulan data yang mungkin tidak ada hubungan dengan masalah yang diteliti"
- (1988:37).

2.2 Dasar Pandangan Teori-Teori Tentang Jenjang Pendidikan Sekolah Akseptor KB Mandiri

2.2.1 Pengertian Pendidikan

Mengenai pengertian pendidikan Amir Dajen Indrakusuma mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang sadar yang teratur dan sistematis, yang dilakukan oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk mempengaruhi anak agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan (1973:27).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang (Sekjen Dep. P. dan K. 1992:5). Pendapat lain mengetahui bahwa pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi kepribadiannya, yaitu (pikir, rasa, karsa, cipta dan budi nurani) dan jasmani (panca indra serta ketrampilan-ketrampilan) (M. Boor Syam, 1980:7).

Bertolak dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya melalui bimbingan, pengajaran dan latihan agar mempunyai sifat dan tabiat seperti yang dicita-citakan sehingga dapat berperan di masa yang akan datang.

2.2.2 Jalur Pendidikan Di Indonesia

Pelaksanaan pendidikan dalam rangka meningkatkan kepribadian peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan dalam kehidupan sehari-hari akan dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang diserahi tanggung jawab pendidikan. Adapun orang-orang atau lembaga-lembaga yang diserahi tanggung jawab pendidikan adalah keluarga, sekolah dan masyarakat. Hal ini dipertegas oleh pendapat H. Noor Syam yang mengatakan bahwa tiap pribadi manusia akan berada dan mengalami perkembangan dalam ketiga lembaga tersebut (keluarga, sekolah dan masyarakat). Berdasarkan realita dan peranan ketiga lembaga ini, maka ahli pendidikan Indonesia Dr. Ki Hajar Dewantara menganggap ketiga lembaga pendidikan ini sebagai tri pusat pendidikan (1980:13).

Selanjutnya tri pusat pendidikan ini dijadikan kebijaksanaan negara kita termuat dalam GBHN 1983 bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan sedini mungkin merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Oleh karena itu peran aktif masyarakat dalam semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan perlu didorong dan ditingkatkan (Dirjen Dikti, 1993:72).

Bertolak dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terselenggaranya pendidikan di Indonesia melalui tiga jalur pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat.

Dalam hal ini lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 bahwa penyelenggara pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah (Sekjen Dep. P dan K, 1992:8).

Berdasarkan penjelasan di atas jelas bahwa terselenggaranya pendidikan di Indonesia dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah yang dalam pelaksanaannya pendidikan keluarga dan pendidikan masyarakat berada di dalamnya.

2.2.2.1 Jalur Pendidikan Luar Sekolah

Dalam hal ini Soedarwoto mengemukakan pendapatnya bahwa pendidikan nasional mempunyai 2 program utama, yaitu program pendidikan sekolah (pendidikan formal) dan pendidikan luar sekolah (Out of school education). Program pendidikan luar sekolah terdiri dari 2 bagian yaitu pendidikan dimasyarakat (pendidikan non formal) dan pendidikan di keluarga (pendidikan in formal) (1986:31).

Pendidikan non formal Amir Daeen Indrakusuma mengatakan bahwa pendidikan non formal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja diluar sekolah dengan tidak terikat oleh jenjang-jenjang pendidikan (1973:43).

Lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 bahwa jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan berkesinambungan. Adapun pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan (Sekjen Dep. P dan K, 1992:8).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jalur pendidikan luar sekolah adalah pelaksanaan pendidikan masyarakat yang sengaja dilaksanakan di luar sekolah dengan tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.

2.2.2.2 Jalur Pendidikan Sekolah

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 dijelaskan bahwa jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan (Sekjen Dep. P dan K, 1992:8).

Demikian juga Soedarwoto mengatakan bahwa pendidikan sekolah (pendidikan formal) adalah sistem pendidikan yang dikenal dengan sekolah yang mapan dewasa ini, memiliki struktur yang khusus, bertingkat dan mengikuti syarat yang jelas dan ketat (1988:32). Pendapat lain mengatakan bahwa pendidikan formal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja di sekolah-sekolah, dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, pendidikan formal ini terikat oleh jenjang-jenjang pendidikan. Untuk masuk SLTP harus lulus SD, untuk masuk SLTA harus lulus SLTP, dan seterusnya (Amir Dairen Indrakusuma, 1973:43).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan sekolah adalah bentuk pendidikan yang secara sengaja dilaksanakan di sekolah-sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang memiliki persyaratan-persyaratan yang jelas dan tegas, berjenjang dan berkesinambungan, dimana untuk masuk SLTP harus lulus SD, untuk masuk SLTA harus lulus SLTP dan seterusnya.

2.2.3 Jenjang Pendidikan Sekolah

Berbicara jenjang pendidikan berdasarkan kedua jalur pendidikan di atas, jelas yang dimaksud adalah jalur pendidikan sekolah. Seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa salah satu ciri pendidikan sekolah adalah berjenjang dan berkesinambungan.

Pengertian jenjang pendidikan sendiri menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta kluasan dan kedalaman bahan pengajaran (Sekjen Dep. P dan K, 1992:8); lebih lanjut juga dijelaskan jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (Sekjen Dep. P dan K, 1992:10).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud jenjang pendidikan sekolah adalah tahap pendidikan berkelanjutan yang terdapat dalam jalur pendidikan sekolah, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik dan kedalaman bahan pengajaran yang diberikan dalam tiap-tiap jenjang.

2.2.3.1 Jenjang Pendidikan Dasar

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 dijelaskan bahwa pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah (Sekjen Dep. P dan K, 1992:10); lebih lanjut dijelaskan juga bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan yang lamanya 9 tahun yang diselenggarakan selama 6 tahun di Sekolah Dasar (SD) dan 3 tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau satuan pendidikan yang sederajat (Sekjen Dep. P dan K, 1992:38).

Mengenai lama pendidikan dasar dipertegas dalam PP No. 28 tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar bahwa pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 tahun, diselenggarakan selama 6 tahun di Sekolah Dasar dan 3 tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat (Sekjen Dep. P dan K, 1992:72).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan dasar adalah jenjang awal dari pendidikan di sekolah untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik untuk hidup dalam masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah dengan lama pendidikan 9 tahun, diselenggarakan 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP.

2.2.3.2 Jenjang Pendidikan Menengah

Dalam PP No. 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah dijelaskan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar (Sekjen Dep. P dan K, 1992:102).

Adapun menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 dijelaskan bahwa pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi (Sekjen Dep. P dan K, 1992:11); lebih lanjut dijelaskan juga bahwa pendidikan menengah merupakan pendidikan yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar dan diselenggarakan di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau satuan pendidikan yang sederajat (Sekjen Dep. P dan K, 1992:37).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan sebagai kelanjutan dari pendidikan dasar dengan lama pendidikan 3 tahun yang diselenggarakan di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan yang memadai sehingga dapat menyiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja atau melanjutkan ke Pendidikan Tinggi.

2.2.3.3 Jenjang Pendidikan Tinggi

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 dijelaskan bahwa pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesi yang dapat denerapkan, mengembangkan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian (Sekjen Dep. P dan K, 1992:11).

Adapun lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut Perguruan Tinggi. Hal ini dijelaskan dalam PP No. 30 tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi (Sekjen Dep. P dan K, 1992:132). Selanjutnya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 dijelaskan bahwa pada Perguruan Tinggi ada gelar sarjana, magister, doktor, dan sebutan profesional (Sekjen Dep. P dan K, 1992:12-13).

Bertolak dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang paling tinggi sebagai kelanjutan dari pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh lembaga Perguruan Tinggi untuk menyiapkan peserta didik melalui kemampuan profesional dengan memberikan gelar bagi para lulusannya.

2.2.4 Pengertian Akseptor KB Mandiri

Menurut Kamus Keluarga Berencana dijelaskan bahwa keluarga berencana merupakan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk menuju keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (BKKBN Pusat, 1992:49).

Adapun menurut Kumpulan Istilah Bidang Kependudukan Keluarga Berencana dijelaskan bahwa keluarga berencana adalah kegiatan untuk melakukan pembatasan klahiran baik sementara agar dapat dicapai jarak yang diharapkan antara dua klahiran, maupun untuk selamanya agar dapat mencegah bertambahnya anak (BKKBN Pusat, 1985:15); lebih lanjut juga dijelaskan tentang pengertian akseptor KB, yaitu pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu kontrasepsi, untuk menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan (BKKBN Pusat, 1985:2).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud akseptor KB adalah pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu kontrasepsi untuk mengatur jarak klahiran atau mengakhiri kehamilan demi terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Dalam buku Informasi Dasar Lingkaran Biro KB dijelaskan bahwa mandiri adalah salah satu sikap mental yang merangsang seseorang untuk berdiri sendiri dan tidak tergantung dari pihak lain (BKKBN Pusat, tth:5); lebih lanjut dijelaskan juga tentang KB Mandiri merupakan pelaksanaan KB dari seseorang atau kelompok yang tidak tergantung dari orang atau pihak lain (BKKBN Pusat, tth:6).

Pengertian KB Mandiri di atas, dipertegas dalam buku Program KB Mandiri adalah suatu keadaan di mana dalam melaksanakan program KB seseorang tidak lagi tergantung pada orang lain (BKKBN Pusat, 1988:33).

Dalam buku Petunjuk Teknis Gerakan KB Mandiri di Bondowoso dijelaskan bahwa kemandirian dalam Keluarga Berencana bagi masyarakat akan terwujud manakala masyarakat secara individu/kelompok telah dapat melaksanakan pengelolaan Keluarga Berencana dengan tanpa ada ketergantungan terhadap pihak-pihak lain utamanya yang menyangkut pemilihan/pemakaian kontrasepsi yang diinginkan sekaligus terhadap dukungan dana yang diperlukan (PEMDA TK II BONDOWOSO, 1991:3); lebih lanjut dijelaskan bahwa kemandirian ber KB dapat dilihat dari dua aspek, yaitu : 1) aspek individu, yaitu bahwa seseorang dalam memenuhi kebutuhan ber KB telah mampu berdiri sendiri atau mampu membayai sendiri, 2) aspek kelompok/organisasi, yaitu organisasi pengelola KB mandiri yang dalam pelaksanaan kegiatan dalam pelayanan KB telah mampu menggunakan daya, dana dan sarana dari organisasinya sendiri (PEMDA TK II BONDOWOSO, 1991:3).

Selanjutnya mengenai cara-cara KB atau metode pemakaian kontrasepsi dikatakan mandiri, dijelaskan dalam buku Petunjuk Teknis KB Mandiri Pola Pedesaan apabila kontrasepsi tersebut diperoleh dengan cara membeli (Tim Kegiatan Terpadu KKBS Tingkat I Jawa Timur, CBR 1992:4).

Adapun mengenai tujuan KB Mandiri dijelaskan dalam buku Panduan Pelayanan KB IBI adalah untuk meningkatkan kesadaran pengetahuan, peran dan tanggung jawab masyarakat untuk menjadi akseptor KB, termasuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan pelayanan KB, termasuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan pelayanan KB masing-masing (PPIBI, 1991:3).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akseptor KB mandiri adalah pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu kontrasepsi dengan inisiatif dan prakarsa sendiri baik secara individu maupun kelompok tanpa ada ketergantungan terhadap orang lain

Dalam buku Petunjuk Teknis Gerakan KB Mandiri di Bondowoso dijelaskan bahwa kemandirian dalam Keluarga Berencana bagi masyarakat akan terwujud manakala masyarakat secara individu/kelompok telah dapat melaksanakan pengelolaan Keluarga Berencana dengan tanpa ada ketergantungan terhadap pihak-pihak lain utamanya yang menyangkut pemilihan/pemakaian kontrasepsi yang diinginkan sekaligus terhadap dukungan dana yang diperlukan (PEMDA TK II BONDOWOSO, 1991:3); lebih lanjut dijelaskan bahwa kemandirian ber KB dapat dilihat dari dua aspek, yaitu : 1) aspek individu, yaitu bahwa seseorang dalam memenuhi kebutuhan ber KB telah mampu berdiri sendiri atau mampu membayai sendiri, 2) aspek kelompok/organisasi, yaitu organisasi pengelola KB mandiri yang dalam pelaksanaan kegiatan dalam pelayanan KB telah mampu menggunakan daya, dana dan sarana dari organisasinya sendiri (PEMDA TK II BONDOWOSO, 1991:3).

Selanjutnya mengenai cara-cara KB atau metode pemakaian kontrasepsi dikatakan mandiri, dijelaskan dalam buku Petunjuk Teknis KB Mandiri Pola Pedesaan apabila kontrasepsi tersebut diperoleh dengan cara membeli (Tim Kegiatan Terpadu KKBS Tingkat I Jawa Timur, CBR 1992:4).

Adapun mengenai tujuan KB Mandiri dijelaskan dalam buku Panduan Pelayanan KB IBI adalah untuk meningkatkan kesadaran pengetahuan, peran dan tanggung jawab masyarakat untuk menjadi akseptor KB, termasuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan pelayanan KB, termasuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan pelayanan KB masing-masing (PPIBI, 1991:3).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akseptor KB mandiri adalah pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu kontrasepsi dengan inisiatif dan prakarsa sendiri baik secara individu maupun kelompok tanpa ada ketergantungan terhadap orang lain

terutama dalam pelayanan, baik dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan maupun pembelian alat kontrasepsi yang diinginkan demi terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Lebih lanjut bertitik tolak dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenjang pendidikan sekolah akseptor KB mandiri adalah tahap pendidikan, baik pendidikan dasar, pendidikan menengah ataupun pendidikan tinggi yang pernah diduduki atau ditempuh oleh pasangan usia subur yang memakai sendiri tanpa ada ketergantungan terhadap orang lain.

Berkaitan dengan kriteria penilaian jenjang pendidikan dalam penelitian ini yang diteliti adalah jenjang pendidikan akseptor KB mandiri dengan menggunakan standar jenjang pendidikan sebagai berikut :

1. jenjang pendidikan dasar, apabila responden memiliki ijazah SD dan SLTP atau yang sederajat (Pendidikan Dasar);
2. jenjang pendidikan menengah, apabila responden memiliki ijazah SLTA atau yang sederajat (Pendidikan Menengah);
3. jenjang pendidikan tinggi, apabila responden memiliki ijazah perguruan tinggi atau yang sederajat (Pendidikan Tinggi);

2.3 Kegiatan Akseptor KB Mandiri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kegiatan sama dengan aktivitas, kegairahan, usaha, pekerjaan, kekuatan dan ketangguhan dalam berusaha (Sekjen Dep. P dan K., 1990:276).

Mengingat KB mandiri merupakan pelaksanaan KB dari seseorang atau inisiatif dan prakarsa sendiri baik secara individu maupun kelompok tanpa harus tergantung pada pihak lain, maka peserta KB/akseptor KB harus berusaha sendiri

dalam rangka mendapatkan kontrasepsi dengan berusaha berarti akseptor KB harus melaksanakan suatu kegiatan/aktivitas tertentu.

Mengenai kegiatan/aktivitas akseptor KB mandiri tersebut menurut buku Program KB Mandiri ada 3 (tiga) yaitu :

1. mendatangi tempat-tempat pelayanan untuk memperoleh kontrasepsi;
2. menggunakan kontrasepsi secara teratur sesuai dengan pedoman pemakaiannya;
3. mengajak tetangga dan kinsman untuk ikut ber KB mandiri (BKKBN Pusat, 1988b:24).

2.3.1 Tempat-tempat Pelayanan Kontrasepsi KB Mandiri

Mengingat dalam program KB mandiri baik dalam pelayanan maupun dalam pemenuhan kebutuhan kontrasepsi sudah tidak mendapat subsidi dari pemerintah, maka semua biaya sepenuhnya ditanggung oleh akseptor yang bersangkutan. Untuk itu tempat-tempat pelayanan KB mandiri antara lain: 1) dokter dan bidan praktik swasta, 2) rumah sakit dan klinik swasta, 3) apotik dan toko obat (BKKBN Pusat, 1988:22).

Adapun akseptor KB yang belum mampu mandiri tempat pelayanan pada jalur pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam buku Petunjuk Teknis KB mandiri Pola Pedesaan bahwa pegiriman calon KB/peserta KB yang belum mampu, ke tempat pelayanan jalur pemerintah (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, RSU, Polides) (Tim Kegiatan Terpadu KKBS Tingkat I Jawa Timur, CBR 1992:4).

Lebih lanjut dalam buku Petunjuk Teknis KB Mandiri Pola Pedesaan dijelaskan bahwa tempat-tempat pelayanan KB Mandiri Pola Pedesaan sebagai berikut:

- "a. setiap calon peserta KB baru untuk pertama kali harus mendapatkan pemeriksaan medis dari dokter, bidan untuk menentukan ada tidaknya pantangan bagi pengguna alat kontrasepsi yang diinginkan oleh peserta KB. Setelah mendapat pemeriksaan medis, mereka mendapat kartu peserta KB Mandiri dan pelayanan KB Mandiri secara langsung atau pada kesempatan lain;
- b. memberi pelayanan langsung kepada calon peserta yang dinyatakan sehat dengan menggunakan alat kontrasepsi mandiri;
- c. memberi pelayanan ulang/pemeriksaan ulang;
- d. penanggulangan terhadap keluhan/gangguan;
- e. memberikan penanganan kegagalan kepada peserta" (Tim Kegiatan Terpadu KKBS Tingkat I Jawa Timur, CBD. 92-93:21)

Pelayanan KB mandiri melalui apotek dijelaskan juga dalam buku Petunjuk Teknis KB Mandiri Pola Pedesaan, yaitu:

- "a. apoteker/asisten apoteker dapat secara langsung memberikan kontrasepsi KB mandiri pil, kondom, dan tissue KB/intravag tanpa resep dokter kepada setiap peserta KB lama yang dapat menunjukkan kartu KB mandiri;
- b. apoteker/asisten apoteker wajib menganjurkan agar penerima pil KB untuk memeriksaan ulang kepada dokter, bidan, atau sarana pelayanan KB mandiri paling lambat 6 (enam) bulan sekali, atau setiap kali ada keluhan atau gangguan" (Tim Kegiatan Terpadu KKBS Tingkat I Jawa Timur, CBD.92-93:22).

Lebih lanjut dalam buku Petunjuk Teknis KB Mandiri Pola Pedesaan juga menjelaskan tentang pelaksanaan pelayanan kontrasepsi melalui Pos Obat Desa bahwa petugas/kader Pos Obat Desa (POD) dapat memberikan pelayanan kontrasepsi ulang pil dan kondom atas permintaan dokter/bidan kepada peserta KB mandiri yang menunjukkan kartu KB mandiri. Selain itu kader Pos Obat Desa (POD) wajib menganjurkan kepada penerima pil KB untuk menjalani pemeriksaan ulang kepada dokter/bidan setiap 6 (enam) bulan sekali (Tim Kegiatan Terpadu KKBS Tingkat I Jawa Timur, CBD.92-93:22).

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa para akseptor KB yang mendapat pelayanan di tempat-tempat pelayanan KB swasta tidak lepas begitu saja setelah mendapatkan ulang, keluhan ataupun gangguan pemakaian alat kontrasepsi. Selain itu untuk membedakan akseptor KB itu mandiri atau tidak, juga dapat dilihat dari tempat-tempat pelayanan di mana akseptor KB tersebut mendapatkan pelayanan kontrasepsi.

2.3.2 Menggunakan Kontrasepsi Secara Teratur Sesuai Dengan Pedoman Pemakaiannya

Setiap akseptor KB khususnya yang mendapat pelayanan di jalur swasta bebas memilih kontrasepsi yang diinginkan sesuai dengan kemampuan dan yang diperlukan. Adapun macam kontrasepsi yang dapat dipilih, disebutkan dalam buku Petunjuk Teknis KB mandiri Pola Pedesaan bahwa macam-macam kontrasepsi itu antara lain : 1) pil KB dengan 6 (enam) pilihan, 2) suntikan KB dengan 2 pilihan, 3) IUD 4 (empat) pilihan, 4) implan 1 (satu) pilihan, 5) kondom dua pilihan, 6) obat vaginal 1 (satu) pilihan (Tim Kegiatan Terpadu KKBS Tingkat I Jawa Timur, CBR 1992-93).

Selanjutnya dalam buku Petunjuk Teknis Pencatatan dan Pelaporan Pendapatan Keluarga Sejahtera Gerakan Keluarga Berencana Nasional pada bagian Register Pendapatan Keluarga Sejahtera tahun 1995 disebut bahwa macam-macam kontrasepsi yang dapat dipilih antara lain : 1) IUD, 2) MOP, 3) MOW, 4) Implant, 5) Suntikan, 6) Pil, 7) Kondom, 8) obat vagina (BKKBN Pusat, 1993:40).

Mengenai penggunaan kontrasepsi di atas dalam Buku Panduan Pelayanan KB IBI dijelaskan bahwa penggunaan IUD merupakan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR). Dengan demikian apabila seseorang memakai alat kontrasepsi IUD pada tempat pelayanan KB, maka IUD tersebut diingat waktu pemasangan yang tepat adalah : 1) pada waktu haid mulai hari ke-3, 2) dua hari sampai empat hari setelah bersalin

atau setelah abortus komplit, 3) empat puluh hari setelah melahirkan, (Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, 1991:57-58). Lebih lanjut dijelaskan juga mengenai MOP dan MOW, bahwa kedua cara kontrasepsi tersebut disebut dengan kontrasepsi mantap. Di mana MOP merupakan cara kontrasepsi dengan pemotongan/pengikatan saluran sperma pria, yang disebut vasektomi atau Medis Operatif Pria (MOP). Sedangkan MOW adalah cara kontrasepsi dengan pemotongan/pengikatan kedua saluran telur pada wanita yang bisa disebut Tubektomi atau Medis Operatif Wanita (MOW). Jadi kontrasepsi mantap sekali dilaksanakan akan dapat mencegah kehamilan selama-lamanya. Dengan demikian kontrasepsi mantap diprioritaskan untuk keluarga yang sudah tidak menginginkan kehadiran anak lagi (Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, 1991:65-67).

Selanjutnya dalam buku Panduan Pelayanan KB IBI dijelaskan bahwa implant alat kontrasepsi yang dipasang dibawah kulit lengan atas wanita. Dengan demikian pemasangan implant hanya dapat dilakukan oleh dokter/bidan di tempat-tempat pelayanan KB. Sekali seseorang memakai implant, maka implant tersebut dapat berfungsi sebagai alat kontrasepsi lima tahun atau belum sampai lima tahun akseptor ingin punya anak lagi atau ingin ganti alat kontrasepsi lain, implant dapat dilepas. Yang perlu diingat pada waktu pemasangan implant saat haid 1-2 hari setelah haid (Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, 1991:53-55).

Kontrasepsi suntikan dijelaskan dalam buku Pedoman Pelayanan KB IBI adalah merupakan suatu cara kontrasepsi dengan jalan menyuntikkan hormon pencegah kehamilan selama tiga bulan. Jadi akseptor mendatangi tempat-tempat kontrasepsi ulang dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali. Perlu diingat bahwa penyuntikan ini pada otot bokong atau otot pangkal lengan (Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, 1991:49-51).

Mengenai kontrasepsi pil dalam buku Panduan Pelayanan KB IBI dijelaskan bahwa kontrasepsi pil merupakan suatu tablet yang berisi hormon estrogen atau hormon progestin yang diminum wanita secara teratur untuk mencegah kehamilan. Adapun cara penggunaan kontrasepsi pil ini antara lain : 1) apabila rangkaian pil berisi 20, 21, dan 22 tablet diminum pada hari ke-5 haid, diteruskan sampai habis, kemudian istirahat dan mulai lagi dengan rangkaian pil yang baru pada hari ke-5, 2) apabila menggunakan pil yang berisi 28 tablet (type berangkai) pil mulai diminum pada hari ke-1 dan selanjutnya terus sampai habis tanpa menghiraukan datang atau tidaknya haid, 3) apabila menggunakan pil berisi 35 tablet (minipil) mulai diminum pada hari ke-1 haid dan hari ke-40 setelah bersalin, dan diteruskan dengan pak berikutnya secara terus-menerus tanpa istirahat, 4) pil diminum pada waktu yang sama pada tiap-tiap hari, sebaliknya sebelum tidur, 5) bila lupa minum pil, maka pil yang kelupaan segera diminum pada hari itu, jadi pada hari yang sama minum 2 pil, 6) bila lupa minum pil 2 hari berturut-turut, maka pil dianggap tidak dapat berfungsi mencegah kemungkinan hamil, sehingga perlu dilanjutkan dengan memakai kondom atau spermicide lain pada waktu senggama, 7) pada waktu yang sehabis melahirkan atau abortus, pil dapat segera diminum (Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, 1991:45-470); lebih lanjut dijelaskan juga tentang kontrasepsi kondom, bahwa kondom merupakan sarung karet tipis yang dipasang pada penis sebagai tempat penampungan kontrasepsi kondom sebagai berikut : 1) kondom dipasang sebelum senggama pada wanita penis ereksi, 2) kondom dilepas setelah selesai ejakulasi dengan cara menahan bagian kondom pada pangkal penis (Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, 1991:63-64).

Jenis apapun alat kontrasepsi yang dipilih dan dipakai oleh akseptor KB semuanya mempunyai aturan dan pedoman pemakaian sendiri-sendiri. Dalam hal ini semua akseptor KB harus menggunakan kontrasepsi yang telah diperoleh sesuai dengan pedoman pemakaiannya agar tidak terjadi keluhan, gangguan ataupun kegagalan akibat kesalahan atau keteledoran dalam pemakaian alat kontrasepsi.

Seperti dijelaskan di muka bahwa hubungan antara akseptor KB dengan tempat-tempat pelayanan KB ataupun petugas PLKB tidak lepas begitu saja setelah akseptor KB tersebut mendapatkan alat kontrasepsi, tetapi masih ada ikatan baik dalam pelayanan kontrasepsi ulang, keluhan maupun gangguan pemakaian kontrasepsi. Selain itu juga ada pemantauan dan tindak lanjut dari petugas KB. Dalam Buku Petunjuk Teknis KB Mandiri Pola Pedesaan dijelaskan bahwa pelaksanaan tindak lanjut itu, antara lain :

- "a. pelaksanaan kunjungan kepada peserta KB yang telah dilayani oleh dokter atau bidan untuk mengetahui tentang hasil pelayanan, serta kemungkinan adanya keluhan atau gangguan;
- b. pemberian motivasi dan pembinaan untuk memantapkan pelaksanaan KB;
- c. membantu peserta KB dalam memenuhi kebutuhan kontrasepsi pil, kondom, atau obat vaginal ulangan;
- d. mengingatkan peserta KB dalam menjalani pemeriksaan ulangan pada waktu yang telah ditentukan;
- e. mengadakan pencatatan terhadap pelaksanaan dan hasil tindak lanjut" (Tim Kegiatan Terpadu KKBS Tingkat I Jawa Timur, CBD. 92-93).

Bertolak dari pelaksanaan tindak lanjut di atas, jelas bahwa semua akseptor KB mendapatkan hak yang sama dalam hal pembinaan dan pemantauan dari petugas KB (PLKB) terutama dalam hal penggunaan alat kontrasepsi. Khusus akseptor KB yang mendapatkan alat kontrasepsi dari tempat-tempat pelayanan swasta pembinaan dan pemantauan itu semakin jelas. Sebab semua akseptor KB yang mendapatkan kontrasepsi kartu peserta KB mandiri dan pelayanan KB

Mandiri. Seperti dijelaskan dalam Buku Petunjuk Teknis KB Mandiri Pola Pedesaan bahwa calon peserta KB baru yang akan datang ke dokter/bidan untuk mendapat pelayanan kontrasepsi, terlebih dahulu harus mendapatkan pelayanan secara medis untuk mengetahui ada tidaknya pantangan bagi penggunaan alat kontrasepsi yang diinginkan, setelah itu baru mendapatkan kartu peserta KB mandiri dan pelayanan KB Mandiri (Tim Kegiatan Terpadu KKBS Tingkat I Jawa Timur, CBD. 92-93:20).

Selanjutnya dengan kartu peserta KB Mandiri dan pelayanan KB mandiri tersebut dalam pembinaan dan pemanfaatan, petugas KB hingga melihat perkembangan isi kartu tersebut. Mengingat kartu tersebut selalu ditunjukkan pada waktu mendatangi tempat-tempat pelayanan KB mandiri dan selalu diisi oleh petugas tempat pelayanan tersebut bila akseptor KB menginginkan kontrasepsi ulang, adanya keluhan ataupun gangguan.

Dalam Buku Petunjuk Teknis Pencatatan Dan Pelaporan Pendapatan Keluarga Sejahtera Gerakan Keluarga Berencana Nasional pada bagian Register Pendapatan Keluarga Berencana tahun 1995 disebutkan bahwa Pasangan Usia Subur yang saat pendataan masih memakai salah satu alat kontrasepsi, untuk menentukan mandiri atau bukan mandiri bertolak pada dimana akseptor KB tersebut mendapatkan pelayanan kontrasepsi. Mengenai tempat pelayanan, dinyatakan dan didata sebagai jalur A (bukan mandiri) bila mendapatkan pelayanan kontrasepsi di tempat pelayanan pemerintah dan didata sebagai jalur B (mandiri) bila mendapatkan pelayanan kontrasepsi di tempat pelayanan swasta.

Bertolak dari semua uraian di atas, jelas bahwa seorang akseptor KB yang ikut berpartisipasi/melaksanakan kedua bentuk kegiatan KB mandiri di atas, oleh petugas PLKB dinyatakan dan didata sebagai akseptor KB mandiri.

2.3.3 Mengajak Tetangga dan Kenalan Untuk Ikut Ber KB Mandiri

Pengertian tetangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang tempat tinggalnya (rumahnya) terletak berdekatan (Dep P dan K, 1990:941); lebih lanjut dijelaskan juga mengenai kenalan bahwa pengertian kenalan adalah orang yang sudah dikenal, sahabat, teman (Dep P dan K, 1990:417).

Berdasarkan kedua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mengajak tetangga dan kenalan untuk ikut ber KB mandiri adalah mengajak atau mempengaruhi orang yang bertempat tinggal di sekitar rumahnya dan orang-orang yang sudah dikenal seperti sahabat atau teman, baik itu teman kerja, teman bermain atau teman-teman.

2.4 Hubungan Jenjang Pendidikan Sekolah Dengan Kegiatan Akseptor KB Mandiri

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 dijelaskan bahwa pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Sekjen Dep P dan K, 1992:10). Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 juga dijelaskan bahwa pendidikan dasar merupakan pendidikan yang lamanya 9 tahun yang diselenggarakan selama 6 tahun di Sekolah Dasar (SD) dan 3 tahun di Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) atau satuan pendidikan yang sederajat (Sekjen Dep P dan K, 1992:36); lebih lanjut dijelaskan juga bahwa pendidikan menengah merupakan pendidikan yang sederajat (Sekjen Dep P dan K, 1992:37). Mengenai pendidikan tinggi dijelaskan juga dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 bahwa

pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian (Sekjen Dep P dan K, 1992:11).

KB mandiri merupakan pelayanan keluarga berencana (KB) dari seseorang yang tidak lagi bergantung pada orang lain, maka akseptor KB mandiri harus berusaha sendiri. Dalam berusaha disini berarti harus melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu. Mengenai kegiatan akseptor KB mandiri menurut buku Program KB Mandiri ada 3 (tiga), yaitu : 1) mendatangi tempat-tempat pelayanan untuk memperoleh kontrasepsi secara teratur sesuai dengan pedoman pemakaiannya, 2) menggunakan kontrasepsi secara teratur sesuai dengan pedoman pemakaian alat kontrasepsi, 3) mengajak tetangga dan kenalan untuk ikut ber KB mandiri (BKKBN Pusat, 1988b:24).

KB mandiri merupakan salah satu program pemerintah, untuk menjadi warga negara yang baik harus mempunyai kesadaran berwarganegara dengan ikut mensukseskan program-program pemerintah yang salah satunya adalah program KB mandiri dengan melaksanakan semua kegiatannya. Lebih lanjut Bintaro Tjokroasmidjojo mengatakan bahwa jenjang atau tingkat pendidikan yang memadai akan memberikan kesadaran yang lebih tinggi dalam berwarganegara dan memudahkan bagi pengembangan identifikasi dalam tujuan pembangunan (1978:228).

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa jenjang pendidikan yang memadai akan menumbuhkan kesadaran yang tinggi dalam berwarganegara yang sekaligus bagi akseptor KB Mandiri akan menumbuhkan kesadaran yang tinggi pula untuk melaksanakan semua kegiatan akseptor KB mandiri.

Jadi jelas bahwa dari uraian di atas, dapat dihipotisiskan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang yang menjadi akseptor KB mandiri akan semakin baik pula dalam kegiatan akseptor KB mandiri.

2.5 Hipotesis

Berdasarkan kerangka teoritis sebagaimana dikemukakan di atas, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Ada hubungan antara jenjang pendidikan sekolah dengan kegiatan akseptor KB mandiri

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Batasan Pengertian Metode Penelitian

Koentjorongrat berpendapat "sehubungan dengan upaya ilmiah maka menyangkut masalah cara kerja untuk memahami obyek-obyek yang menjadi sasaran ilmiah yang bersangkutan" (1986:260). Sedangkan Winarno Surachmad mengatakan bahwa metode merupakan cara utama untuk mencapai tujuan (1985:67).

Berdasarkan dua pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode merupakan suatu cara atau jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian.

3.2 Metode Penentuan Daerah Penelitian

Daerah penelitian merupakan tempat atau lokasi berlangsungnya suatu penelitian. Dalam menentukan daerah penelitian, tidak ada ketentuan yang pasti tentang berapa luas daerah harus diambil untuk ditetapkan sebagai suatu daerah penelitian. Hal ini sesuai dengan pendapat Sri Adji Surjadi bahwa "sebenarnya tidak ada ketentuan yang mutlak tentang berapa luas daerah penelitian tidak ada ketentuan tetapi tempat mengadakan penelitian harus jelas. Adapun daerah penelitian yang ditetapkan adalah 3 desa sebagai sample dari desa yang ada di wilayah Kecamatan Tapen, 3 (tiga) desa tersebut adalah : 1) desa Cindogo 2) desa Wonokusumo 3) desa Mangli Wetan.

3.3 Metode Penentuan Responden Penelitian

Dalam suatu penelitian ada kalanya peneliti menjadi obyek untuk diteliti, adakalanya mengambil sebagian dari obyek yang dilakukan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan (Muhammad Ali, 1987:54). Dalam penelitian sosial, metode penentuan responden merupakan serangkaian kegiatan

yang sangat penting dan menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian. Namun terlebih dahulu perlu dikemukakan pengertian responden itu sendiri.

Menurut Sri Adji Surjadi "responden adalah orang yang memberikan respon tentang masalah yang diteliti baik populasi maupun sample" (1984:160). Sedangkan Koentjorongkrat mengatakan responden adalah wawancara untuk mendapatkan keterangan tentang diri sendiri atau pandangan dari individu yang diwawancara (1985:130). Kemudian Sutrisno Hadi berpendapat bahwa "responden adalah orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan dalam questioner, dan dapat memberikan jawabannya secara bebas pada tiap-tiap item" (1991:158).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa responden adalah orang yang dapat memberikan respon tentang masalah yang diteliti baik populasi maupun sampel dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peneliti untuk meraih data penelitian.

Dalam penelitian ini disamping menggunakan responden, juga menggunakan informan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian. Koentjorongkrat mengatakan informan adalah wawancara untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu tertentu untuk keperluan informasi (1985:130). Sedangkan Sutrisno Hadi mengatakan bahwa informan adalah orang-orang berkedudukan sebagai pemberi informasi (1991:183). Kemudian Sri Adji Surjadi mengatakan informan adalah orang-orang yang dapat memberi informasi terhadap masalah penelitian (1984:2).

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa informan adalah orang-orang yang berkedudukan sebagai pemberi informasi terhadap masalah penelitian dengan metoda wawancara untuk mendapatkan keterangan dan

data individu-individu tertentu. Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah : 1) camat, 2) petugas PLKB, 3) kepala desa, 4) tokoh masyarakat, 5) ketua RW dan RT.

Sedangkan penelitian pada garis besarnya ada 2 (dua) yaitu penelitian populasi dan penelitian sampel. Penelitian yang digunakan ini menggunakan sampel yang diusahakan dapat mewakili populasi. Sri Adji Surjadi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili dari populasi yang dikensi penelitian, sampel dapat berupa manusia atau bukan manusia (1978:2). Sedangkan Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, jika dalam penelitian hanya meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel (1992:104).

Kemudian Winarno Surachmad berpendapat bahwa seringkali jumlah populasi tidak terbatas, maka seringkali penyelidik terpaksa menggunakan sebagian saja dari populasi yakni sebuah sampel yang dipandang representatif terhadap populasi (1985:484). Mengenai besarnya sampel yang harus diteliti dari suatu populasi, sebenarnya tidak ada suatu ketentuan yang mutlak. Sutrisno Hadi menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada suatu ketentuan mutlak berapa persen sampel yang harus diambil dari populasi tidak perlu menimbulkan keraguan (1991:73). Sedangkan Muhammad Nasir mengatakan bahwa terlalu besar sampel berarti pemborosan tenaga dan biaya, dan terlalu kecil sampel dapat menjurus besarnya error (1988:340).

Dalam suatu penelitian ini untuk menentukan jumlah sampel yang diambil dari populasi, menggunakan pedoman dari sekedar ancar-ancar Suharsimi Arikunto memberi rekomendasi "apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10 - 15% atau 20 - 25 % atau lebih" (1992:107).

Berdasarkan pendapat di atas, karena pengambilan sampel dalam penelitian ini ditetapkan 100 orang responden dari jumlah populasi orang akseptor KB Mandiri yang pernah menduduki jenjang pendidikan sekolah dengan memiliki ijazah kelulusan, sebagaimana seratus orang responden ini diambil secara merata dan berimbang dari keseluruhan sub populasi.

Sedangkan untuk menentukan besar kecilnya jumlah sampel agar seimbang dengan jumlah populasi yang tersebar diseluruh sub populasi menggunakan metoda proporsional sampel. Demikian juga Sutrisno Hadi mengatakan bahwa "proporsional sampel adalah sampel yang terdiri dari sub-sub sampel yang pertimbangannya mengikuti pertimbangan sub-sub populasi" (1991:75). Sedangkan yang digunakan untuk pertimbangan dalam pengambilan sampel adalah akseptor KB Mandiri memiliki ijazah pendidikan sekolah (responden) yang bertempat tinggal di desa Cindogo, desa Wonokusumo dan desa Mangli Wetan.

Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan proporsinya adalah sebagai berikut :

$$X_i = \frac{P_i}{N} \times R$$

dimana :

X_i = jumlah mewakili populasi;

P_i = jumlah mewakili masing-masing populasi;

N = jumlah populasi keseluruhan

R = jumlah variabel penelitian yang diambil sebagai sampel.

Indek Xi menunjukkan bahwa jumlah individu yang mewakili yang diambil dari sub populasi yang sama, yaitu akseptor KB Mandiri yang memiliki ijazah pendidikan sekolah yang bertempat tinggal di desa Cindogo, desa Wonokusumo desa Mangli Wetan.

Dalam pengambilan individu-individu yang dijadikan responden dari tiap-tiap sub populasi, adalah dengan random sampling cara undian. Adapun langkah-langkahnya menurut Sutrisno Hadi adalah sebagai berikut :

1. buatlah suatu daftar yang berisi semua subyek, obyek, gejala, peristiwa atau kelompok-kelompok yang ada dalam populasi;
2. buatlah kode-kode yang berwujud angka untuk tiap-tiap subyek, obyek, gejala, peristiwa atau kelompok-kelompok yang dimaksud dengan subnya;
3. tulislah kode-kode ini masing-masing dalam suatu lembar kertas kecil;
4. gulung kertas-kertas itu dengan baik;
5. masukan gulungan-gulungan kertas dalam tempolong, atau tempat-tempat yang semacamnya;
6. kocok baik-baik tempolongan atau kaleng itu;
7. ambil gulungan kertas itu sebanyak yang dibutuhkan" (1991:76).

Berdasarkan uraian di atas, maka metoda penentuan responden penelitian ini adalah dengan menggunakan metoda proporsional random sampling.

Kemudian alasan menggunakan metoda proporsional random sampling ini antara lain: 1) sampel yang diambil tersebar pada sub-sub populasi, 2) untuk menghindari perasaan mengistimewakan satu atau beberapa subyek penelitian, sehingga dapat memberikan kesempatan yang sama pada semua subyek penelitian untuk menjadi sampel.

3.4 Metoda Pengumpulan Data

Beberapa metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. observasi
2. angket

3. wawancara
4. dokumenter

3.4.1 Observasi

Yang dimaksud dengan observasi menurut Sri Adji "observasi dalam arti sempit adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap fakta-fakta dan gejala yang diteliti. Dalam arti luas, observasi adalah pengamatan yang dilakukan semua indra dan pencatatan secara sistematis terhadap semua gejala, data dan fakta, baik secara langsung dalam waktu dan tempat tertentu dimana fakta, data dan gejala tersebut ditemukan" (1984: 13). Sedangkan Sutrisno Hadi mengatakan observasi sebagai berikut : "sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena yang diselidiki" (1992:136).

Berdasarkan dua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa observasi adalah suatu teknik atau cara penyelidikan terhadap fakta, data dan gejala yang ada suatu tempat tertentu dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang diselidiki.

Menurut Sutrisno Hadi ada enam jenis ciri-ciri observasi yaitu :

1. observasi mempunyai arah yang khusus
2. observasi ilmiah tentang tingkah laku adalah sistematis
3. observasi bersifat kuantitatif artinya mencatat jumlah peristiwa tentang tipe-tipe tingkah laku tertentu
4. observasi meminta keahlian
5. observasi mengadakan pencatatan dengan segera
6. observasi dapat dicek dan dibuktikan (1991:136).

Kemudian Bimo Walgito berpendapat bahwa ada tiga macam observasi yaitu :

1. observasi yang berpartisipasi
2. observasi non partisipasi
3. observasi turut partisipasi (1985:55).

Berdasarkan pendapat di atas, dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi non partisipasi, yang dilakukan melalui pengamatan dalam situasi yang sebenarnya.

3.4.2 Angket

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa "angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden" (1990:124). Sedangkan Kartini Kartono berpendapat :

"angket atau kuesioner merupakan suatu penyelidikan mengenai suatu masalah yang umumnya banyak menyangkut kepentingan umum, dilakukan dengan suatu daftar pertanyaan berupa formulir-formulir diajukan secara tertulis kepada sejumlah subyek untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan tertulis seperlunya" (1990:112).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa angket merupakan suatu daftar pertanyaan tertulis yang disebarluaskan kemudian dijawab oleh responden. Sutrisno Radi menjelaskan bahwa :

"angket atau kuesioner dapat dibedakan menjadi kuesioner langsung dan tidak langsung. Suatu kuesioner disebut kuesioner langsung jika daftar pertanyaan dikirimkan langsung pada orang yang ingin diminta pendapat, keyakinan atau diminta menceritakan tentang dirinya sendiri. Sebaliknya jika daftar pertanyaan dikirim kepada seseorang yang diminta menceritakan keadaan orang lain disebut kuesioner tidak langsung" (1992:158).

Kemudian Suharsimi Arikunto juga berpendapat "bila kuesioner dipandang dari jawaban yang diberikan maka yang dimaksud kuesioner langsung adalah responden menjawab tentang dirinya sendiri, sedangkan kuesioner tidak langsung yaitu jika responden menjawab tentang orang lain" (1990:125).

Dari bentuk itemnya dapat dibagi sebagai berikut :

1. pertanyaan yang tertutup;
2. pertanyaan yang terbuka;
3. pertanyaan yang terbuka dan tertutup (Bimo Walgito, 1985:65).

Kartini Kartono juga berpendapat :

"menurut bentuk pertanyaan kuesioner/angket dapat diberikan menjadi dua golongan yaitu : angket bentuk isian dan angket bentuk pilihan. Angket bentuk isian dapat dibedakan menjadi angket bentuk isian terbuka atau angket terbuka dan angket yang bentuk angket isian tertutup atau angket tertutup. angket bentuk isian terbuka memberikan kebebasan pada responden untuk memberikan jawaban, sebaliknya kuesioner dalam bentuk tertutup hanya meminta responden untuk menjawab pertanyaan dengan jawaban yang singkat. Sedangkan angket bentuk pilihan meminta responden memilih dari sekian kemungkinan jawaban atau sekian alternatif yang telah disediakan" (1986:215).

Berdasarkan pemahaman tentang jenis dan ciri-ciri angket di atas, maka dalam penelitian ini digunakan jenis angket tertutup dengan bentuk konstruktif item pilihan ganda, karena pilihan yang diajukan disertai beberapa alternatif jawaban. Berdasarkan jawaban itu responden tinggal memilih jawaban yang dinilai paling sesuai. Sedangkan cara penyampaian angket digunakan angket langsung kepada responden dan diberikan dalam situasi tatap muka.

Beberapa hal yang penulis jadikan pertimbangan dalam menggunakan metoda angket tertutup dan langsung ini adalah:

- a. dengan angket langsung dimaksudkan agar dapat memperoleh data dari responden secara langsung
- b. dalam angket tertutup telah disediakan beberapa alternatif jawaban dari tiap-tiap pertanyaan yang diajukan, sehingga jawaban yang diberikan responden sesuai dengan arah penelitian.

3.4.3 Wawancara

Sutrisno Hadi mengatakan :

"interview dapat dipandang sebagai metoda pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik serta berlandaskan pada tujuan penyelidikan. Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam proses tanya jawab dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran atau cara-cara komunikasi yang lancar" (1991:139).

Sru Adji Surjsdi memberikan batasan tentang wawancara yaitu :

"interview atau lebih sering disebut wawancara, adalah suatu proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu melihat yang lain dengan mendengarkan suaranya" (1978:22).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa metoda wawancara adalah suatu metoda pengumpulan data dengan jalan tanya jawab antara dua orang atau lebih.

Sedangkan jenis-jenis interview menurut Sutrisno Hadi dibedakan menjadi 4 jenis yaitu :

1. interview terpimpin,
2. interview tak terpimpin,
3. interview pribadi dan kelompok,
4. interview bebas terpimpin (1991:204).

Berdasarkan jenis interview yang telah dijelaskan di atas dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yang dilaksanakan secara pribadi.

Sutrisno Hadi berpendapat :

"dalam interview bebas terpimpin, penginterview membawa kerangka pertanyaan-pertanyaan untuk disajikan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang diciptakan oleh penginterview sehingga tercipta kebebasan dalam mengajukan pertanyaan maupun dalam menjawabnya" (1991:207).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa interview bebas terpimpin adalah suatu interview yang terjadi dimana interview sudah mempersiapkan terlebih

dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui proses tanya jawab secara lisan kepada yang diwawancara, sedangkan bagaimana cara dan irama dalam mengajukan pertanyaan tersebut tergantung kepada keahlian dan kemampuan interview sehingga tidak akan mengurangi maksud pertanyaan yang sebenarnya.

Adapun alasan peneliti menggunakan metoda wawancara ini adalah :

1. interview merupakan salah satu metoda yang baik untuk menilai keadaan pribadi;
2. pewawancara dapat mengadakan interview sambil mengadakan observasi;
3. interview dapat digunakan untuk memperjelas data yang diperoleh dengan metoda lain;
4. interview tidak membatasi subyek yang diteliti.

3.4.4 Dokumenter

Metode dokumenter merupakan suatu metoda untuk mendapatkan data dengan jalan mempelajari dokumen yang ada.

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa metoda dokumenter adalah "mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya" (1990:188). Sedangkan menurut Koentjoronginrat bahwa "dokumenter adalah sejumlah data yang tersedia dalam surat-surat, catatan harian kenang-kenangan, laporan dan sebagainya" (1985:46).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metoda dokumenter adalah alat untuk meraih data dengan jalan mendapatkan keterangan yang sudah ada atau sudah didokumentasikan.

Sedangkan melaksanakan metoda dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto dibedakan menjadi 2 cara yaitu :

1. pedoman dokumentasi, yaitu termuat garis-garis besar atau katagori yang akan dicari datanya;
2. checklist, yaitu daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Dalam hal ini peneliti tinggal memberi tanda setiap pemunculan gejala yang dimaksud" (1985:115).

Adapun alasan peneliti menggunakan metode dokumenter ini adalah :

1. data lebih mudah diraih;
2. data dapat disimpan dalam waktu yang lama;
3. menghasilkan informasi yang berguna untuk evaluasi atau revisi data dari metoda lain.

3.5 Metoda Analisis Data

Analisis data mempunyai fungsi sebagai alat untuk mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan/penelitian, karena analisis data sangat dipentingkan. Muhammad Nasir mengatakan bahwa "analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metoda ilmiah, karena dengan analisis data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian" (1986:21).

Dalam suatu penelitian terdapat dua metoda yang biasa digunakan untuk analisis data, yaitu metoda statistik dan metoda non statistik. Analisis statistik biasanya disebut sebagai analisis kuantitatif, sedangkan analisis non statistik disebut analisis kualitatif. Teknik analisis data kuantitatif disebut juga teknik statistik, dan digunakan untuk mengolah data yang berbentuk angka, baik hasil pengukuran maupun hasil penggunaan mengubah data kualitatif (Muhammad Ali, 1982:155). Kemudian H. Magsun Arr dkk, menegaskan bahwa statistik adalah sekumpulan cara atau aturan tentang pengumpulan, penyusunan, pengolahan, penganalisaan dan penarikan kesimpulan serta membuat keputusan data yang berbentuk angka-angka (1991:10). Selanjutnya Sutrisno Hadi mengatakan "bahwa statistik adalah cara-cara

adalah cara-cara ilmiah untuk mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data penelitian yang berwujud angka-angka" (1992:121).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa statistik merupakan suatu cara pengolahan data yang diperoleh dari penelitian dengan menggunakan hitungan matematika yang berwujud angka-angka.

Berikut metoda statistik dalam penelitian ini menggunakan rumus Yule's Q dengan sistem katagori dichotomis

Sedangkan langkah-langkah yang ditempuh dalam menggunakan teknik analisis data dengan rumus Yule's Q adalah :

- a. mengumpulkan data;
- b. membuat kriteria penilaian untuk membagi data yang standar yang ditentukan;
- c. memasukan data tersebut kedalam kolom-kolom persiapan kerja yang telah disiapkan;
- d. setelah jumlah masing-masing atau frekuensi masing-masing diketahui, lalu dihitung untuk diketahui hasilnya;
- e. hasil analisis tersebut dikonfirmasi dengan nilai-nilai yang ada dalam konversi, kemudian dapat menguji hipotesis yang diajukan.

Adapun analisis data yang digunakan adalah teknik Yule's Q dengan rumus sebagai berikut :

$$Q_{XY} = \frac{(B \times C) - (A \times D)}{(B \times C) + (A \times D)}$$

Sedangkan tabel yang digunakan untuk analisis rumus Yule's Q, dengan dua variabel adalah :

Variabel	Variabel Y		Jumlah
	Not Y	Y	
X	A	B	A + B
Not X	C	D	C + D
Jumlah	A + C	B + D	N

Keterangan :

Variabel X = independen variabel

Variabel Y = dependen variabel

Masing-masing variabel dikategorikan menjadi dua yaitu :

1. Baik = B

2. Kurang = K

N = jumlah seluruh responden penelitian

Kolom A = jumlah frekuensi variabel X yang berkeadaan not Y

Kolom B = jumlah frekuensi variabel X yang berkeadaan Y

Kolom C = jumlah frekuensi variabel not X yang berkeadaan not Y

Kolom D = jumlah frekuensi variabel not X yang berkeadaan not Y

Adapun langkah-langkah konkret analisis data dengan rumus Yule's Q dalam meraih data dari responden adalah :

1. berkaitan dengan kriteria penilaian jenjang pendidikan sekolah akseptor KB Mandiri dalam BAB II telah disebutkan dengan menggunakan standar penilaian adalah :

a. jenjang pendidikan dasar apabila responden memiliki ijazah SD dan SLTP atau yang sederajat (PD);

- b. jenjang pendidikan menengah, apabila responden memiliki ijazah SLTA yang sederajat (PM);
- c. jenjang pendidikan tinggi, apabila responden memiliki ijazah Perguruan Tinggi atau yang sederajat (PT).

Berdasarkan dengan tiga kriteria penilaian jenjang pendidikan sekolah di atas, karena menggunakan analisis data rumus Yule's Q dua variabel, maka tiga kriteria tersebut diubah dengan cara menggabungkan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi sehingga menjadi dua kriteria yang susunannya adalah :

- a. jenjang pendidikan dasar, apabila responden memiliki ijazah SD dan SLTP atau yang sederajat dengan kriteria (PD);
 - b. jenjang pendidikan menengah dan tinggi, apabila responden memiliki ijazah SLTA dan Perguruan Tinggi atau yang sederajat dengan kriteria (PM dan PT).
 - c. adapun alasan Pendidikan menengah digabung dengan Pendidikan Tinggi karena pada kenyataan dilapangan jumlah responden yang memiliki ijazah Perguruan Tinggi sangat sedikit.
2. dari hasil penelitian data responden yang berupa angket, dimasukkan dalam tabulasi data penilaian adalah :

Nomer Responden	Item			Jumlah Score	Kategori
	1	2	3		
Jumlah					

3. pada angket dengan item bentuk multiple choice atau pilihan ganda tiga option a, b, c, apabila responden menjawab a dinilai 3, bila menjawab b dinilai 2, dan jika menjawab c, dinilai 1;
4. setelah dikemukakan jumlah score dari masing-masing responden maupun jumlah score seluruh responden, kemudian dicari nilai meannya dengan rumus :

$$M = \frac{\sum X}{N}$$

Keterangan :

M = mean

X = jumlah keseluruhan score

N = jumlah responden

5. setelah diketemukan meannya, kemudian mencari jumlah nilai masing-masing yang berkatagori baik dan kurang baik yang berpedoman pada mean, jika lebih besar dari mean dikatagorikan baik dan jika sama atau kurang dari mean dikatagorikan kurang baik;
6. langkah lanjutnya setelah diketahui jumlah responden yang berkatagori baik dan kurang baik serta jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah dan tinggi, kemudian dimasukkan dalam tabel analisis dengan rumus Yule's Q sebagai berikut :

Jenjang Pendidikan Sekolah Akseptor KB Mandiri (X)	Kegiatan akseptor KB Mandiri (Y)		Jumlah
	Kurang Baik (K)	Baik (B)	
PM & PT	A	B	A + B
PD	C	D	C + D
Jumlah	A + C	B + D	N

7. setelah semua data dimasukkan dalam tabel, kemudian dianalisis dengan menggunakan rumus Yule's dua variabel :

$$Q_{XY} = \frac{(B \times C) - (A \times D)}{(B \times C) + (A \times D)}$$

Sedangkan data hasil penelitian yang dianalisis dengan rumus Yule's Q akan beberapa keuntungan sebagaimana yang dikemukakan oleh H. Magsun Arr. dkk adalah :

1. sekaligus dapat mengetahui kekuatan hubungan;
2. dapat dipakai untuk menganalisa dua variabel atau lebih;
3. dapat diperoleh generalisasi secara rasional berdasarkan hasil statistik sampel terhadap populasi, sebab menggunakan prinsip sampel matematis;
4. mempergunakan katagori dichotomi dan rumus hitungan sederhana (tidak sulit) sehingga secara teknis mudah" (1991:133).

Selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan variabel Y, ditentukan berdasarkan konvensi jadi penafsiran nilai q hasil hitungan dikonsultasikan berdasarkan suatu daftar konvensi nilai-nilai q , seperti tercantum dibawah ini :

Konvensi nilai-nilai Q

Nilai Q	Arti Penafsiran
+ 0,70 - keatas	Hubungan positif yang sangat kuat
+ 0,50 - + 0,69	Hubungan positif yang mantap
+ 0,30 - + 0,69	Hubungan positif yang sedang
+ 0,10 - + 0,69	Hubungan positif yang rendah
+ 0,01 - + 0,69	Hubungan positif yang tidak berarti
0,00	Tidak ada hubungan
- 0,01 - (- 0,09)	Hubungan negatif yang berarti
- 0,10 - (- 0,29)	Hubungan negatif yang rendah
- 0,30 - (- 0,49)	Hubungan negatif yang sedang
- 0,50 - (- 0,69)	Hubungan negatif yang mantap
- 0,70 - kebawah	Hubungan negatif yang sangat kuat

(Magsun Arr. dkk, 1991:137)

Hal ini berarti bahwa dengan menggunakan rumus Yule's Q ada 3 bentuk hubungan yaitu :

1. hubungan positif, yang berarti tanda (+), ini mengandung pengertian bertambahnya variabel X akan diikuti pula oleh bertambahnya variabel Y dan sebaliknya berkurangnya variabel X akan diikuti pula oleh berkurangnya variabel Y,
2. hubungan negatif, yang berarti tanda (-), pada korelasi yang negatif terjadi perlawanan arah gerak antara variabel X dan variabel Y. Bertambahnya variabel X akan diikuti oleh penurunan variabel Y, demikian pula penurunan variabel X akan diikuti oleh bertambahnya variabel Y,
3. tidak ada hubungan, yang diberi tanda (0), artinya variabel X dan variabel Y tidak saling mempengaruhi.

Adapun alasan peneliti menggunakan teknik korelasi Yule's Q adalah :

1. data yang diraih adalah data ordinal yang dapat dijadikan data katagori dichotomi,
2. cara mengerjakan dengan rumus Yule's Q mudah dan efisien,
3. Sekaligus dapat untuk mengetahui kekuatan hubungan antara variabel X dengan variabel Y.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian hipotesis yang telah dijelaskan BAB IV, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif yang mantap antara jenjang pendidikan sekolah dengan kegiatan akseptor KB mandiri di wilayah kecamatan Tapen Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso.

Dari kesimpulan di atas dapat penulis simpulkan semakin tinggi jenjang sekolah akseptor KB mandiri, maka semakin baik pula dalam kegiatan akseptor KB mandiri dan semakin rendah jenjang pendidikan sekolah akseptor KB mandiri, maka semakin kurang pula dalam kegiatan akseptor KB mandiri.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, maka saran dari peneliti dengan harapan agar bermanfaat dalam upaya mensukseskan program KB mandiri khususnya diwilayah kecamatan Tapen Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso adalah sebagai berikut :

a. Kepada Pemerintah

- Jika Pemerintah ingin mensukseskan program KB mandiri, maka program wajib belajar perlu ditingkatkan agar jenjang pendidikan semakin tinggi.
- Mengingat jenjang pendidikan sekolah mempunyai hubungan positif yang mantap dengan kegiatan akseptor KB mandiri, maka terobosan lewat jalur pendidikan luar sekolah yang sedang diterajut dengan pendidikan sekolah seperti "kejar paket" perlu ditingkatkan.

- b. Kepada Petugas PLKB dan Pejabat yang Berwenang
 - Mengingat sebagian besar masyarakat Kecamatan Tapen berpendidikan rendah, maka perlu ditingkatkan adanya motivasi atau penyuluhan akan pentingnya KB mandiri pada masyarakat.
- c. Kepada Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat
 - Demi suksesnya program KB mandiri, perlu adanya motivasi dan dukungan untuk mensukseskan program ini jilid belajar.
- d. Kepada Akseptor KB Mandiri
 - Untuk dapat mengembangkan diri untuk memperoleh pengetahuan baru yang berhubungan dengan peningkatan jenjang pendidikan sekolah, seperti SHP Terbuka yang sudah ada di wilayah Kecamatan Tapen.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Daien Indrakusuma, 1973, Pengantar Ilmu Pendidikan, Usaha Nasional, Surabaya.
- Bimo Walgito, 1985, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1987, Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3S, Jakarta.
- BKKBN Pusat, tth, Informasi Dasar Lingkaran Biru KB, BKKBN Pusat, Jakarta.
- _____, 1985, Kumpulan Istilah Bidang Kependudukan Dan Keluarga Berencana, BKKBN, Pusat, Jakarta.
- _____, 1988, Bunga Rampai Pidato Kepala BKKBN, BKKBN, Pusat, Jakarta.
- _____, 1988, Program KB Mandiri, BKKBN, Pusat, Jakarta.
- _____, 1989, Buku Sumber Pendidikan KB, BKKBN, Pusat, Jakarta.
- _____, 1992, Kamus Istilah Keluarga Berencana, BKKBN, Pusat, Jakarta.
- _____, 1993, Petunjuk Teknis Pencatatan Dan Pelaporan Pendapatan Keluarga Sejahtera Gerakan Keluarga Berencana Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1980, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dirjen Dikti, 1993, UUD 1945 P-4 GBHN Bahan Penataran Dan Bahan Reverensi Penataran, Dirjen Dikti, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1991, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Alumnes, Bandung.
- Koentjaraningrat, 1985, Metoda-metoda Penelitian Masyarakat, Gramedia Jakarta.
- Hagsun Arr, Haitami Sofwan, Misno A. Lathif, 1991, Pengantar Statistik Pendidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember, Jember.
- Marzuki, 1983, Metodologi Riset, BPFE UII, Yogyakarta.
- M. Noor Syam, 1980, Pengantar Dasar-Dasar Pendidikan, Tim Dosen FIP Malang, Usaha Nasional, Surabaya.
- Mohamad Nasir, 1988, Metoda Penelitian, Ghalia, Jakarta.
- Muhammad Ali, 1987, Penelitian Kependudukan. Prosedur dan Strategi, Angkasa Bandung.

- Paulus Waluyo, 1978, Diktat Kuliah Statistik Pendidikan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, Jember.
- Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso, 1981, Petunjuk Teknis KB Mandiri Di Bondowoso, Pemerintah Daerah Tingkat II Bondowoso.
- Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, 1991, Panduan Pelayanan KB IBL, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia.
- Sanspiah Faisal, 1980, Pengantar Dasar-dasar Pendidikan, Tim Dosen FIP Malang, Usaha Nasional, Surabaya.
- Sekretariat Jendral Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Jendral Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Sru Adji Surjadi, 1978, Metodologi Research, Eka Badranaya, Jember.
- _____, 1984, Dasar Penelitian Laksana II, Eka Badranaya, Jember.
- Suharsimi Arikunto, 1991, Prosedur Penelitian, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sutrisno hadi, 1987, Metodologi Research, Jidil 2, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- S. Wojowassito, 1976, Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Hasta Karya, Jakarta.
- Tim Kegiatan Terpadu Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera tingkat I Jawa Timur, CBD. 82 -83, Petunjuk Teknis KB Mandiri Pola Pedesaan, Tim Kegiatan Terpadu Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera Tingkat I Jawa Timur, Surabaya.
- Winarno Surachmad, 1985, Dasar Dan Teknis Research Pengantar Metodologi Ilmiah, Tarsito Bandung.
- W.J.S Poerwadarminto, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABLE	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	HIPOTESIS PENELITIAN
HUBUNGAN ANTARA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DENGAN KEGIATAN AKSEPTOR KB MANDIRI DI KECAMATAN TAPEN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO TAHUN 1995	<p>1. Jenjang Pendidikan Sekolah</p> <p>2. Kegiatan Akseptor KB Mandiri</p>	<p>1.1 Ijazah terakhir pendidikan Sekolah yang dimiliki (Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi)</p> <p>2.1 Mendatangi tempat tempat pelayanan untuk memperoleh kontracepsi</p> <p>2.2 Menggunakan kontrasepsi sesuai dengan pedoman pemakainya</p> <p>2.3 Mengajak tetangga dan kenalan untuk ikut ber-KB Mandiri</p>	<p>1. Responden : 100 orang Akseptor Mandiri yang memiliki ijazah Pendidikan Sekolah</p> <p>2. Informan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Camat - Petugas PLKB - Tokoh Masyarakat - Ketua RW dan ketua RT - Kepala Desa <p>3. Dokumentasi</p> <p>4. Kepustakaan</p>	<p>1. Penentuan Daerah Penelitian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Purposive Sample <p>2. Penentuan Respondee Penelitian :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Propotional Random Sampling <small>Metode Pengambilan Sampel</small> - Metode Angket <p>3. Metode Observasi</p> <p>4. Metode Analisis Data</p> <p>Metode Statistik dengan menggunakan rumus Yules'Q</p> $Qxy = \frac{(BxC) - (AxD)}{(BxC) + (AxD)}$	<p>1. Hipotesis Kejaya Mayor Ada hubungan antara jenjang pendidikan Sekolah dengan Kegiatan KB Mandiri</p>

ANGKET UNTUK RESPONDEN

I. Pengantar

Bersama ini saya sampaikan satu angket kepada saudara-saudara akseptor KB Mandiri. Maksud angket ini adalah untuk memperoleh data penelitian yang berhubungan dengan masalah kegiatan akseptor KB Mandiri.

Saya mohon saudara-saudara sudi meluangkan waktu sejenak untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada dalam angket ini secara obyektif (jujur). Jawaban saudara tidak akan mengurangi ataupun mempengaruhi kedudukan saudara-saudara dan dijamin kerahasiaannya.

Akhirnya atas segala bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan banyak terima kasih.

Peneliti

(Teti Sumiyatiningsih)

II. Petunjuk Pengisian

- a. Sebelum menjawab setiap pertanyaan tulislah terlebih dahulu indentitas saudara pada tempat yang lebih tersedia.
- b. Jawaban pertanyaan di bawah ini sesuai dengan kenyataan yang ada.
- c. Berilah tanda silang pada huruf di depan jawaban yang saudara anggap paling cocok dengan keadaan saudara.

III. Identitas Responden

- a. Nama :
- b. Umur :
- c. Kontrasepsi yang dipakai :
- d. Ijazah terakhir yang dimiliki:
- e. Desa :

IV. Daftar Pertanyaan

Kegiatan Akseptor KB Mandiri

- 1. Dalam menentukan jenis kontrasepsi yang anda pakai, apakah anda selalu konsultasi dengan Dokter ?
 - a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Jarang
- 2. Dalam menentukan kontrasepsi yang anda pakai, apakah anda selalu konsultasi dengan Bidan ?
 - a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Jarang
- 3. Apabila terjadi keluhan mengenai kontrasepsi yang anda pakai, apakah anda selalu mendatangi Dokter ?
 - a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Jarang
- 4. Apabila terjadi keluhan mengenai kontrasepsi yang anda pakai, apakah anda selalu mendatangi Bidan ?
 - a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Jarang
- 5. Apabila terjadi gangguan mengenai kontrasepsi yang anda pakai, apakah anda selalu mendatangi Dokter ?
 - a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Jarang

6. Apabila terjadi gangguan mengenai kontrasepsi yang anda pakai, apakah anda selalu mendatangi Bidan ?
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Jarang
7. Untuk memudahkan pelayanan, apakah anda selalu membawa kartu peserta KB Mandiri pada setiap kali mendatangi tempat-tempat pelayanan KB Mandiri ?
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Jarang
8. Dibalik kartu peserta KB Mandiri terdapat jadwal kapan anda harus periksa ulang ataupun kontrasepsi ulang, apakah anda selalu melaksanakan jadwal tersebut tepat pada waktunya ?
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Jarang
9. Apakah anda selalu melaksanakan pedoman penggunaan ataupun perawatan kontrasepsi yang anda pakai yang dijelaskan oleh Dokter atau Bidan Anda ?
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Jarang
10. Apakah anda sering menjelaskan tentang pentingnya KB Mandiri kepada tetangga anda ?
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Jarang
11. Apakah anda sering menjelaskan tentang pentingnya KB mandiri kepada tetangga anda ?
a. Selalu
b. Kadang-kadang
c. Jarang

12. Apakah anda sering mengajak tetangga anda untuk ikut ber KB mandiri ?
- Selalu
 - Kadang-kadang
 - Jarang
13. Apakah anda sering mengajak teman (siapa saja yang pernah anda kenal) untuk ikut ber KB mandiri ?
- Selalu
 - Kadang-kadang
 - Jarang
14. Apabila tetangga anda anda yang meminta anda untuk mengantarkan ketempat-tempat pelayanan KB untuk menjadi akseptor KB mandiri, apakah anda selalu mengantarkannya ?
- Selalu
 - Kadang-kadang
 - Jarang
15. Apabila teman (kenalan anda) ada yang meminta anda untuk mengantarkan ke tempat-tempat pelayanan KB untuk menjadi akseptor KB Mandiri, apakah anda selalu mengantarkannya ?
- Selalu
 - Kadang-kadang
 - Jarang

Lampiran 3

Tabel 2 Hasil Rekaman Data Tentang Kegiatan Akseptor KB Mandiri

No Renc.	Kegiatan Akseptor KB Mandiri														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	b	a	b	b	b	a	a	b	a	b	c	a	b	b	b
2	b	a	b	a	b	a	a	b	a	b	c	b	c	b	a
3	a	b	b	b	a	b	a	s	s	a	b	a	b	b	a
4	c	a	b	b	a	b	a	a	a	b	c	a	b	b	b
5	s	b	b	a	b	a	s	s	a	b	c	s	b	b	b
6	c	a	b	b	c	a	a	a	b	b	c	b	c	b	b
7	b	a	b	b	b	a	a	s	s	b	b	s	b	b	c
8	c	a	c	b	a	a	b	b	a	b	c	b	c	b	c
9	b	a	b	b	a	b	a	b	a	s	b	s	b	b	b
10	c	a	b	b	b	a	a	b	a	s	b	c	b	c	a
11	a	b	b	a	b	s	a	s	s	b	s	b	b	b	c
12	c	a	b	b	b	s	a	s	s	s	s	s	b	b	a
13	c	a	b	b	b	s	a	s	s	a	b	b	a	b	a
14	b	a	b	b	b	s	a	s	s	a	b	s	b	b	c
15	c	a	b	b	b	s	a	s	b	s	b	c	b	b	b
16	a	c	b	b	a	b	s	b	s	a	c	a	b	b	c
17	a	a	b	b	b	s	a	b	s	b	b	b	b	b	c
18	b	a	b	b	b	s	a	b	s	b	c	a	b	b	b
19	b	a	c	a	b	b	s	b	s	b	c	b	b	b	c
20	a	b	b	b	a	b	s	b	s	b	b	a	b	b	c
21	b	a	b	b	b	s	a	s	s	s	b	a	b	b	b
22	c	a	b	b	b	c	a	s	b	s	b	c	b	b	c
23	s	a	b	s	s	b	s	b	s	a	b	a	b	b	a
24	b	a	b	b	b	s	a	a	s	b	b	b	b	b	c
25	c	a	b	b	b	s	a	s	a	c	b	c	b	c	c
26	b	a	b	s	a	b	s	a	b	s	b	b	s	b	b
27	s	b	b	b	b	s	a	s	a	b	c	b	b	b	c
28	s	c	c	b	a	b	s	b	s	a	c	b	b	b	c
29	a	c	b	a	s	b	s	b	s	b	c	b	b	b	c
30	b	a	b	b	b	s	a	s	b	s	b	b	a	b	c
31	b	a	n	c	b	a	a	s	a	s	b	a	b	b	b
32	s	b	b	b	b	s	a	s	b	s	b	a	b	b	a
33	c	a	c	b	b	a	s	b	s	b	c	b	b	b	c
34	b	a	b	a	s	b	a	s	b	s	b	c	a	b	b
35	c	a	b	b	a	c	a	s	b	s	b	b	b	b	c
36	a	c	b	a	b	a	s	b	s	a	b	b	b	b	c
37	s	b	b	b	b	n	a	s	a	s	b	a	b	b	b
38	s	c	b	b	a	c	s	b	s	a	b	c	b	c	c

dilanjutkan

Tabelan 2.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
39	a	c	b	b	b	a	s	b	a	b	b	b	b	c	e
40	b	a	c	b	b	b	a	b	a	b	b	b	b	b	c
41	a	b	b	a	s	a	a	b	a	b	b	a	b	b	c
42	c	a	c	a	b	a	s	b	a	b	c	b	b	b	c
43	a	c	b	c	a	c	s	b	a	b	b	c	b	b	c
44	a	b	b	b	b	a	s	b	a	b	b	b	b	b	b
45	c	a	b	c	a	c	s	a	b	a	b	c	b	b	c
46	a	b	b	b	a	b	a	b	a	b	b	b	b	b	b
47	c	s	b	b	b	a	b	a	b	a	b	b	b	b	b
48	a	b	c	b	b	a	b	a	a	b	b	b	b	b	b
49	c	a	b	b	b	a	b	a	a	a	b	b	b	b	b
50	a	a	b	b	b	s	b	a	s	a	b	a	b	b	b
51	b	c	e	b	b	a	b	a	s	b	c	b	b	b	c
52	a	b	b	b	b	a	s	s	a	b	b	b	b	b	c
53	c	a	b	b	a	b	a	s	s	b	b	b	b	b	c
54	c	a	b	b	b	b	a	s	b	a	b	c	b	b	c
55	b	a	b	b	b	c	a	s	b	a	b	c	b	b	b
56	a	c	b	b	a	b	a	b	a	b	b	c	b	b	b
57	a	c	b	a	s	b	a	s	a	b	b	b	b	b	c
58	c	a	b	a	b	a	b	a	s	b	c	b	b	b	b
59	c	a	c	b	b	a	c	s	b	a	b	c	b	b	c
60	n	c	b	c	a	b	a	b	a	b	c	b	b	c	c
61	n	b	b	c	c	a	b	s	s	a	b	b	p	b	b
62	a	c	b	b	b	s	b	a	s	b	c	b	b	b	b
63	b	a	b	b	s	b	a	b	s	a	b	b	a	b	a
64	n	b	b	b	a	b	a	b	s	a	b	b	s	b	c
65	n	c	c	b	b	a	b	a	s	a	b	c	b	c	c
66	b	a	b	b	n	b	a	s	a	b	b	b	b	b	c
67	a	b	b	b	b	c	a	s	b	a	b	b	b	b	b
68	c	a	b	b	b	a	s	s	a	b	b	c	b	b	b
69	c	a	b	a	b	b	a	s	s	a	b	c	a	b	b
70	b	a	a	b	b	s	b	a	s	a	b	s	a	b	b
71	c	s	b	b	b	b	a	s	a	b	b	b	a	b	c
72	a	c	b	c	b	a	b	s	a	b	b	b	b	b	b
73	b	a	b	b	b	b	a	a	a	b	b	b	b	b	c
74	a	c	b	a	s	b	a	s	a	b	b	b	a	b	b
75	b	a	b	b	b	a	b	a	s	a	b	c	b	c	c
76	c	a	b	b	b	b	a	s	b	a	b	c	b	c	c
77	b	a	a	c	s	b	b	s	a	a	b	b	b	b	b
78	c	a	b	a	b	s	b	s	b	a	b	b	b	b	b
79	c	a	b	a	b	s	b	s	b	a	b	b	a	b	b
80	n	b	b	n	b	s	b	s	a	a	b	a	b	b	c
81	c	a	b	b	b	b	a	a	b	a	b	c	s	b	b
82	b	a	c	a	b	a	s	s	b	a	b	c	b	c	c
83	b	a	b	a	b	a	s	s	b	a	b	c	b	c	c
84	c	a	b	a	b	a	s	s	a	a	c	c	b	b	c

dilanjutkan

lanjutan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85	b	a	b	n	n	s	a	b	s	b	b	a	b	b	c
86	b	a	b	a	a	b	a	s	a	a	b	a	b	b	a
87	c	a	b	a	b	a	s	a	a	a	b	s	b	b	a
88	c	n	b	a	s	a	s	a	a	b	c	b	b	b	c
89	a	b	b	a	a	b	s	s	a	b	b	a	b	b	b
90	b	a	b	c	a	a	n	s	a	b	b	n	b	c	a
91	a	c	a	b	a	b	n	b	a	b	b	b	b	b	c
92	b	a	b	b	b	a	s	b	a	a	b	a	b	b	c
93	s	c	n	c	s	b	s	b	s	b	b	b	b	b	b
94	c	s	b	a	a	b	n	s	a	b	b	s	b	b	c
95	b	a	b	b	a	b	s	b	a	b	c	b	b	c	c
96	n	a	b	b	a	b	n	a	a	b	b	a	b	b	b
97	c	a	c	b	c	s	s	b	a	b	b	b	b	b	a
98	a	c	b	b	b	a	a	b	a	b	b	b	b	b	a
99	b	a	b	s	a	b	s	b	a	b	b	s	b	b	b
100	b	a	b	b	s	b	a	s	a	b	c	a	c	b	b

Keterangan :

No. Ben : Nomor Responden

No. 1 sampai 16 : Nomor Kolom

Kolom 2 sampai 16: Nomor Pertanyaan/Item Angket.

Lampiran 4

PROSESAR DOCUMENTER

No	Data Yang diperlukan	Sumber Data
1.	Peta Wilayah Kecamatan Tapen	Dokumen Kantor Kecamatan Tapen
2.	Batas Wilayah Kecamatan Tapen	Dokumen Kantor Kecamatan Tapen
3.	Jenis Wilayah menurut Jenis Pengguna Tanah	Dokumen Kantor Kecamatan Tapen
4.	Jumlah sarana Perehonomian wilayah Kecamatan Tapen	Dokumen Kantor Kecamatan Tapen
5.	Jumlah tempat ibadah wilayah Kecamatan Tapen	Dokumen Kantor Kecamatan Tapen
6.	Jumlah Sarana pendidikan wilayah Kecamatan Tapen	Dokumen Kantor Kecamatan Tapen
7.	Jumlah norma kesehatan dan Keluarga Berencana	Dokumen Kantor Kecamatan Tapen
8.	Struktur pola organisasi Kecamatan Tapen	Dokumen Kantor Kecamatan Tapen
9.	Pembagian jumlah penduduk menurut jenis media periklarian	Dokumen Kantor Kecamatan Tapen
10.	Nama-nama kepala desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Tapen	Dokumen Kantor Kecamatan Tapen
11.	Jenis-jenis alat yang dimiliki oleh akseptor KB Mandiri di tiga desa yang menjadi sampel	Dokumen Kantor Desa
12.	Jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Tapen	Dokumen Kantor PLTB Kecamatan Tapen
13.	Jumlah PHS dan akseptor KB	Dokumen Kantor PLTB
14.	Jumlah alat/cara kontrasepsi yang dipakai oleh akseptor KB	Dokumen Kantor PLTB
15.	Nama-nama akseptor KB Mandiri	Dokumen Kantor PLTB
16.	Nama-nama PLTB dan PPKB untuk kiswi tapen	

Lampiran 5

PEDOMAN INTERVIEW

NO	Data Yang diraih	Sumber Data
1	Gambaran tentang sosial ekonomi, agama, pendidikan, alam dan kebudayaan masyarakat di bawah Kecamatan Tapen	Camat Tapen
2	Gambaran secara umum tentang kesadaran masyarakat Kecamatan Tapen terhadap Program KB	PLKB Kecamatan Tapen
3	Gambaran secara umum tentang pelaksanaan Kelompok KB Mandiri di Desa	Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat

Lampiran 6

PEDOMAN OBSERVASI

No	Data Yang diperlukan	Sumber Data
1	Peta Letak Kecamatan Tapen dan batas-batasnya	Kantor Kecamatan Tapen
2	Ketersediaan data yang dibutuhkan dalam penelitian	Kantor Kecamatan Tapen, PELB Kecamatan Tapen, dan kantor Desa yang menjadi sampel penelitian

Lampiran 7

Nama-nama Responden Penelitian

Ro	R a m a	T j a s a h l e r e n k h i r y a n g d i m i l i k i	B a r i (TH)	K o n t e n s p e r i y a n g d i p a k e t	A l a m a t
1	2	3	4	5	6
1	Ry. Bismati	SD	23	PIL	Monoklasimo
2	Ry. Bawinti	SD	26	Santik	Monoklasimo
3	Ry. Rahayu	D3	24	Santik	Monoklasimo
4	Ry. Sri Hulyati	SMP	31	IUD	Monoklasimo
5	Ry. Rohani	SD	28	Santik	Monoklasimo
6	Ry. Saryani	SMP	21	PIL	Monoklasimo
7	Ry. Puryana	Tsanawiyah	19	Santik	Monoklasimo
8	Ry. Aryatun	SMP	23	Santik	Monoklasimo
9	Ry. Riaati	SMA	28	Santik	Monoklasimo
10	Ry. Halimah	SD	28	IUD	Monoklasimo
11	Ry. I.E.A	SMA	27	Santik	Monoklasimo
12	Ry. Sainita	SMA	27	Santik	Monoklasimo
13	Ry. Farida	SD	18	Santik	Monoklasimo
14	Ry. Lillik	Sarjana	26	Santik	Monoklasimo
15	Ry. Tinimah	SD	29	Santik	Monoklasimo
16	Ry. Zubaida	SD	34	PIL	Monoklasimo
17	Ry. Satini	SD	25	Santik	Monoklasimo
18	Ry. Urah	SMA	32	IUD	Monoklasimo
19	Ry. Hisyeh	SMA	20	PIL	Monoklasimo
20	Ry. Rnis	Tsanawiyah	34	IUD	Monoklasimo
21	Ry. Haroroh	SMA	36	IUD	Monoklasimo
22	Ry. Alisah	SMP	27	IUD	Monoklasimo
23	Ry. Aminalah	SD	24	Santik	Monoklasimo
24	Ry. Boluaya	SMP	21	Santik	Monoklasimo
25	Ry. Karsih	SD	21	Santik	Monoklasimo
26	Ry. Haliyah	SMP	22	Santik	Monoklasimo
27	Ry. Ibu	SD	28	Santik	Monoklasimo
28	Ry. Harvi	SD	19	PIL	Monoklasimo
29	Ry. Jumaliyyah	SMA	25	Santik	Monoklasimo
30	Ry. Sasmimi	SMP	31	Santik	Monoklasimo
31	Ry. Agustini	SMA	22	Santik	Monoklasimo
32	Ry. Sari	SMA	26	Santik	Monoklasimo
33	Ry. Aina	SD	21	Santik	Monoklasimo
34	Ry. Tuti	SD	24	Santik	Monoklasimo
35	Ry. Dynah	SMP	21	Santik	Monoklasimo
36	Ry. Renu, SH	Sarjana	25	Santik	Monoklasimo
37	Ry. Saliani	SMP	22	PIL	Monoklasimo
38	Ry. Tijah	SMA	27	IUD	Monoklasimo
39	Ry. Endangestri	SD	28	Santik	Monoklasimo

di lanjutkan

Tanjutan

1	2	3	4	5	6
40	Ry. Bainurah	SMP	23	PIL	Monoksumo
41	Ry. Sutiyah	SD	27	Suntik	Monoksumo
42	Ry. Yuli	SMP	22	Suntik	Monoksumo
43	Ry. Irin	SD	31	BID	Monoksumo
44	Ry. Lestari	SD	24	PIL	Monoksumo
45	Ry. Janniyah	Tsanawiyah	33	HON	Monoksumo
46	Ry. Pantzi	SD	27	Suntik	Monoksumo
47	Ry. Tomyew	SHA	24	Suntik	Monoksumo
48	Ry. Katin	SMP	19	Suntik	Monoksumo
49	Ry. Sudarmi	SMP	25	Suntik	Monoksumo
50	Ry. Sohartini	SHA	27	Suntik	Monoksumo
51	Ry. Titin	SD	21	Suntik	Monoksumo
52	Ry. Endah	SD	19	Suntik	Monoksumo
53	Ry. Cholis	SMP	22	Suntik	Monoksumo
54	Ry. Pujiastuti	SD	26	Suntik	Monoksumo
55	Ry. Harsih	SD	36	BID	Hangli Wetan
56	Ry. Handayani	SHA	23	Suntik	Hangli Wetan
57	Ry. Atikah	SMP	19	Suntik	Hangli Wetan
58	Ry. Chellish	SD	35	Suntik	Hangli Wetan
59	Ry. Tutik	Tsanawiyah	27	Suntik	Hangli Wetan
60	Ry. Yanti	SD	32	Suntik	Hangli Wetan
61	Ry. Kokon	SHA	26	Suntik	Hangli Wetan
62	Ry. Sali	SMP	21	Suntik	Hangli Wetan
63	Ry. Kristiani	SHA	33	Suntik	Hangli Wetan
64	Ry. Sos	SD	18	Suntik	Hangli Wetan
65	Ry. Rotno	SD	23	Suntik	Hangli Wetan
66	Ry. Warsi	SD	31	Suntik	Hangli Wetan
67	Ry. Takimah	SHA	24	Suntik	Hangli Wetan
68	Ry. Tulint	SD	28	Suntik	Hangli Wetan
69	Ry. Ani	SMP	24	Suntik	Hangli Wetan
70	Ry. Wicik	Sarjana	29	Suntik	Hangli Wetan
71	Ry. Arin	SD	24	Suntik	Hangli Wetan
72	Ry. Sri	Aliyah	25	Suntik	Hangli Wetan
73	Ry. Yatni	SD	19	PIL	Hangli Wetan
74	Ry. Indri	SHA	32	Suntik	Hangli Wetan
75	Ry. Jarmini	SD	26	Suntik	Cindogo
76	Ry. Titik	SD	21	Suntik	Cindogo
77	Ry. Supriyati	SHA	32	Suntik	Cindogo
78	Ry. Herawati	SD	22	Suntik	Cindogo
79	Ry. Pur	SMP	19	Suntik	Cindogo
80	Ry. Banung	Aliyah	27	Suntik	Cindogo
81	Ry. Hizyati	SD	37	BID	Cindogo
82	Ry. Dwi	SD	29	BID	Cindogo
83	Ry. Hira	SMP	24	Suntik	Cindogo
84	Ry. Tini	SD	22	Suntik	Cindogo
85	Ry. Saitra	Aliyah	27	Suntik	Cindogo

dilanjutkan

Lanjutan

1	2	3	4	5	6
86	Ry. Sarji, SE	Sarjona	28	Sontik	Cindogo
87	Ry. Elvi	SMP	19	Sontik	Cindogo
88	Ry. Yuni	SD	30	Sontik	Cindogo
89	Ry. Karminati	SHA	23	Sontik	Cindogo
90	Ry. Sardarmi	SD	19	Sontik	Cindogo
91	Ry. Iunah	SD	31	Sontik	Cindogo
92	Ry. Rina	SMP	25	IUD	Cindogo
93	Ry. Basnah	SHA	29	PIL	Cindogo
94	Ry. Sriyatni	SMP	22	Sontik	Cindogo
95	Ry. Desri	SD	18	PIL	Cindogo
96	Ry. Saminah	SHA	25	Sontik	Cindogo
97	Ry. Ramyatiin	SD	23	Sontik	Cindogo
98	Ry. Ratna	Tsanawiyah	27	Sontik	Cindogo
99	Ry. Sumini	SHA	31	Sontik	Cindogo
100	Ry. Saerah	SD	38	HOM	Cindogo

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI

ISI OLEH MAHASISWA YANG BERGANGKUTAN :

N A M A : Teti Sumiyatiningsih.....
Nomor Induk Mahasiswa : 9102104325.....
Jurusan / Program : IP/DLG.....
Angkatan tahun : 1991.....
Tempat dan Tanggal Lahir : Bekasi, 1 Agustus 1972.....
Thema Skripsi yang diajukan : BKBN.....
.....
.....
.....

Dosen Pembimbing yang ditunjuk sesuai dengan Jurusan :
I. Drs. H. Sukanto Irch.
II. Drs. Khutobah

Tanggal Pengajuan : 3 Mei 1995.....

ISI OLEH BAGIAN AKADEMIK (PENGELOLA PROGRAM) :

Keterangan yang dapat diberikan atas Mahasiswa tersebut :

a). Pada saat ini tersebut telah mencapai :

..... 144 SKS (..... 2695)

Sub. Bagian Akademik / Sis Kredit.

SETUJUAN DARI PEMBIMBING SKRIPSI YANG DITUNJUK :

Judul Skripsi selengkapnya yang ditunjuk oleh pembimbing :
HUBUNGAN ANTARA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DENGAN KEPIATAN
AKSEPTOR KR MANDIRI DI KECAMATAN TAPEN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BONDOWOSO TAHUN 1995

Persetujuan Pembimbing dan Pengesahan oleh Ketua Jurusan :

Pengesahan oleh Ketua Jurusan : Ilmu Pendidikan

Tanggal : 3 Mei 1995

DOSEN PEMBIMBING II

DOSEN PEMBIMBING I

MAHASISWA YANG
BERGANGKUTAN

H. S.

Drs. Khutobah

NIP. 131 131 017

H. S.

Drs. H. Sukanto Irch

NIP. 130 325 913

Teti Sumiyati, N.

NIM. 9102104325

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

N o m o r : 42/3/PT.32.45. FKIP/17/1995 J a m b e r , N o v e m b e r 1995
Lampiran : Proposal
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth. : Bapak Rektor
Cq, Kepala Pusat Penelitian
Universitas Jember
di -
J e m b e r

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan ijin penelitian atas :

N a m a : TETI SUMIYATININGSIH
N I M : 9102104325
Jurusan : Ilmu Pendidikan
Fakultas : FKIP
J u d u l : Hubungan Antara Jenjang Pendidikan Sekolah Dengan Kegiatan Akseptor KB Mandiri Di Kecamatan Tapen Kabupaten DATI II Bondowoso Tahun 1995
Tempat yang dituju untuk penelitian ;
1. Di Kecamatan Tapen Kabupaten DATI II Bondowoso,
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mendapatkan data dalam rangka menyelesaikan program S1.

Demikian atas perhatiannya kami ucapan terima kasih..

An. Dekan

Bantuan Dekan I,



Soedija
261 656-



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER

Alamat: JL. Kalimantan - Kecamatan Tepalluhut - Fax (0331) 31477
Kotak Pos 159 Telepon: (0331) 21270 41422 Jember (68171)

Nomer : 1126 / PT/32.119/RS/

Tanggal : 12/5

Lampiran :

Perihal : Pengajuan izin penelitian
berdasarkan anggaran.

Kepada : Bapak Idr. Gubernur KDI Provinsi Timur
Np. Ndr. Kepala Direktorat Sosial-Politik
di
S U R A B A Y A.

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan izin
mengadakan penelitian untuk memperoleh data :

N o m o r : 1126 / PT/32.119/RS/ 310210422

Dosen/Mahasiswa : Fakultas Tegarwah & Ilmu Pendidikan
Universitas Jember

A l m a n t : jl. Pallmantan No.5 B Jember

Judul penelitian: KERJUJAN ANTARA JENANG PENDIDIKAN
SISWAH DI ICAT PEGIATAN AKSIYON SAB
SYUHRI DI KBL. TAPEN KAB. BATU IT
Di daerah : Kbl. Tapen PONDOKKO,

Lamaran : 1 lembar

Untuk pelaksanaan penelitian tersebut di atas, mohon
baiknya serta perkenan Saudara untuk memberikan izin
kepada dosen/mahasiswa tersebut dalam mengadakan penel-
itian sesuai dengan judul tersebut di atas.

Demikian atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan
terima kasih.



Tembusan kepada:

1. Sdr. Dekan, Fakultas Tegarwah
Universitas Jember
2. Dosen/Mahasiswa yang berangkatkan
3. Sdr. Kasubag. TH Unj. Jember

Drs. LIAKI P. M.
NIP: 140511 976

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO
KANTOR SOSIAL POLITIK

Jalan Letnan Arifir Kusman Nomor 2 Telepon 21153/23
BONDOWOSO

Bondowoso, 17 - / - 1995

Nomor : 072 / 303 / 438.63/1995.
Sifat : SEGERA
Lampiran :
Perihal : Penelitian / Survey / Research

K E P A D A
Yth. Sdr. GAMAT TAPEN
DI
BONDOWOSO

Menunjuk surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur up. Kepala Direktorat Sosial Politik Tingkat I Jawa Timur

Tanggal : 13 Nopember 1995
Nomor : 072/5565/303/1995

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : **TETI SUMIYATININGSIH**
Alamat : **JL. KALIMANTAN NOMOR 5 B JEMBER**
Pekerjaan : **MHS. FKIP UNIV. JEMBER**
Kebangsaan : **WARGA NEGARA INDONESIA**

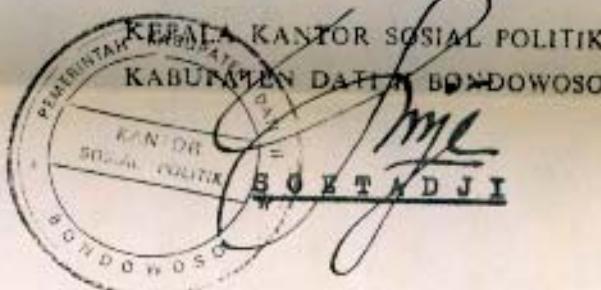
Bermaksud mengadakan penelitian **"HUBUNGAN ANTARA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DENGAN AKSEPTOR KB MANDIRI"**.
Judul / Thema / Tujuan : **ATAS AKSEPTOR KB MANDIRI**.

Waktu : **2 (DUA) BULAN TERHITUNG TANGGAL 13 NOPEMBER 1995**
Lokasi : **KECAMATAN TAPEN KABUPATEN BONDOWOSO**
Peneliti / Peserta : **-----**

Kepada tersebut alamat harap memberikan bantuan untuk kelancaran tugas penelitian / survey / research tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II**
BONDOWOSO



TYMBUSAN : Kepada

1. Gubernur Kepala Dati I Jawa Timur.
2. Pembantu Gubernur Wil. VII Jember.
3. Bupati Kepala Dati II Bondowoso (sebagai laporan).
4. Kepala BKBN Kabupaten Bondowoso.

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
JL PEMUDA NO. 5 TELP. 43020 - 45673
S U R A B A Y A

SURAT KETERANGAN A S L I

Untuk melakukan survey / research

Nomor : 072/..... 5364/303/... 1995

Membaca 1. SRT. KETUA LEPEN UNIV. JEMER. 6 NOVEMBER 95 NO. 7629.s/PT32.eH9/N5*95.
2. SRT. KAKANWIL EKIM PRO. JATIM. 13 NOVEMBER 1995 NO. 607/PD.101/L.13/XI-95

Mengingat

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1972
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Java Timur tg. 17 Juli 1972 No. Gub./167/1972.

dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilakukan survey / research oleh :

Nama Penanggung Jawab:



TETI SUMIYATNINGSTI

MHS. FKIP UNIV. JEMER.

JL. KALIMANTAN NO. 5 B JEMER.

Alamat

Thema / Acara survey / research

" HUBUNGAN ANTARA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DENGAN KE
AKSEPTOR KB MANDIRI DI KEC. TAPEN KAB. DATI II BONDOWOSO "

Daerah/Tempat dilakukan survey/research

KABUPATEN DATI II BONDOWOSO

Lamanya survey / research

2 (DUA) BULAN, TERHITUNG TGL. SURAT DIKELUARKAN.

Pengikut / peserta survey / research

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II dan Kepolisian segera.
2. Mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah segera.
3. Menjaga rasa tertib, keamanan, kesopanan dan keselamatan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan/tulisan yang dapat melukai/menyindir perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut di atas.
5. Setelah berakhirkannya dilakukan survey/research, diwajibkan terlebih dahulu melapor kepada Pejabat Pemerintah segera mengenai secepatnya pelaksanaan survey/research, sebelum meninggalkan daerah tempat survey/research.
6. Dalam jangka waktu suatu bulan setelah selesai dilakukannya survey/research, diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada

1. Ketua BAPPEDA Prop. Daerah Tk. I Java Timur
2. Kepala Direktorat Sospol Prop. Daerah Tk. I Java Timur,
3. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II yang bersangkutan,
4. Kanwil/Direktorat/Dinas/Jawatan/Instansi/Lembaga ygbs.
- 5.

7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai tersebut di atas.

TEMUAN disampaikan kepada :

1. Yth. Pangdam V/Vrawijaya
2. - Kapolda Java Timur
3. - Ketua Bappeda Prop. Daerah Tk. I Java Timur
4. - Kanwil/Direktorat/Dinas/Jawatan/Instansi/Lembaga ygbs.
5. - Pembantu Gubernur di **JEMER**
6. - Bupati Kepala Daerah Tk. II **BONDOWOSO**
7. - Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

Surabaya, 13 NOVEMBER 1995
A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Kepala Direktorat Sosial Politik
DIREKTORAT

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONDOWOSO
KECAMATAN TAPEN
Jalan Raya Situbondo, Nomor 1, Telepon : 21001 - 328/2
TAPEN

SURAT KETERANGAN

nomor : 090/636/403,732/1995

Yang bertanda tangan dibawah ini "Camat Tapen, Kabupaten
Daerah Tingkat II Bondowoso , menerangkan bahwa :

N a m a n : TETI SUMIYATNINGSIH
N I K : 9102104325
Pekerjaan : Mahasiswa FKIP Universitas Negeri Jember
A l s a m a t : Jln. Kalimantan Nomor 53 Jember
telah melaksanakan surveiy/research di Wilayah Kecamatan Tapen
Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso dengan baik
secara dilihat prosedur .

Dandim surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya .

Tapen, 4 Desember 1995



RIP.510 090 134

LEMBAR KONSULTASI PENYUSUNAN SKRIPSI

NAMA : Teti Sumiyatiningsih
JIM / JURUSAN / ANGK. : 9102104325/IP - PLS/1991
JUDUL SKRIPSI : HUBUNGAN ANTARA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DENGAN KEGIATAN
AKSEPTOR KB. MANDIRI DI KECAMATAN TAPEN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BONDOWOSO TAHUN 1995
PEMBIMBING : Drs. H. Sukamto Irch.
KEGIATAN KONSULTASI

No.	Hari & tanggal	Materi Konsultasi	T.T. Pembimbing
1	Sabtu, 5 Mei 1995	PENGANTAR JUDUL	
2	Selasa, 23 Mei 1995	PENGANTAR MATRIK	
3	Jumat, 4 Agustus 1995	PENGANTAR BAB I, II dan III	
4	Senin, 19 Agustus 1995	REVISI BAB I, II, III Dan	
5		PENGANTAR PROPOSAL + ANGKET	
6	Kamis, 22 Januari 1996	Pengajuan Bab IV Dan V	
7	Rabu, 29 Januari 1996	Revisi	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Catatan :

1. Lembar ini harus dibawa dan diisi setiap melakukan konsultasi.
2. Lembar ini harus dibawa sewaktu Ujian Pra Skripsi dan Ujian Skripsi.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS KEHURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

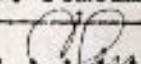
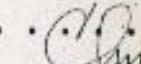
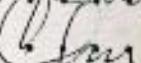
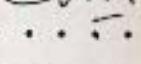
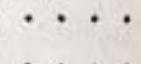
LEMBAR KONSULTASI PENYUSUNAN SKRIPSI

N A M A : Tati Sumiyatiningsih
NIM / JURUSAN / ANGK. : 9102104325/JP - PLS/1991

JUDUL SKRIPSI :
HUBUNGAN ANTARA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DENGAN KEGIATAN
AKSEPTOR KR MANDIRI DI KECAMATAN TAPEN. KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II. BONDOWOSO. TAHUN 1995

PEMBIMBING : Dra. Khutobah

KEGIATAN KONSULTASI

No.	Hari & tanggal	Materi Konsultasi	T.T. Pembimbing
1 3 Mei 1995	Pengajuan . . .	
2	Senin . . . 29 Mei 1995	Pengajuan . . . Matrik.	
3	Senin . . . 19 Juli 1995	Pengajuan . . . Bab I, II dan III	
4	Senin . . . 19 Agustus 1995	Rivisi . . . Bab I, II, III dan	
5	Pengajuan . . . Proposal + Angket	
6	Rabu . . . 3 Januari 1996	Pengajuan . . . Bab IV dan V	
7	Rivisi . . .	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Catatan :

1. Lembar ini harus dibawa dan diisi setiap melakukan konsultasi.
2. Lembar ini harus dibawa sewaktu Ujian Pra Skripsi dan Ujian Skripsi.